

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rumusan singkat berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945, negara Indonesia bercita-cita mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945 alinea IV adalah "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial" . Oleh karenanya negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup warga negaranya.

Upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat harus dibarengi dengan usaha untuk meletakkan landasan yang kuat agar pembangunan tahap berikutnya dapat lebih terarah, efektif dan efisien. Upaya tersebut harus didukung data yang benar baik untuk perencanaan maupun evaluasi hasil-hasil pembangunan. Membangun tanpa data ibarat berjalan tanpa tujuan. Untuk itulah, peran data dirasakan semakin penting, terutama yang secara spesifik berkaitan erat dengan permasalahan kesejahteraan rakyat.

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Temanggung merupakan salah satu wahana yang dapat membantu memberikan berbagai data output dan input kesejahteraan rakyat yang ada di masyarakat sebagai hasil dari berbagai proses pembangunan. Data yang disajikan bersifat makro dan merupakan hasil dari suatu proses pengukuran berbagai keadaan lapangan sebagai akibat proses pembangunan.

1.2. Tujuan

Tujuan publikasi “Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Temanggung 2015” ini adalah:

- a. Memberikan data strategis di bidang kesejahteraan rakyat.
- b. Memberikan gambaran tentang indikator kesejahteraan rakyat yang merupakan hasil pembangunan yang berkelanjutan,
- c. Memberikan informasi yang baik untuk evaluasi dan perencanaan pembangunan

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyusunan publikasi ini adalah kondisi kesejahteraan rakyat yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung tahun 2014. Kesejahteraan rakyat mengandung makna yang cukup luas, sedemikian luasnya pengertian kesejahteraan sehingga data statistik ekonomi konvensional seperti pendapatan per kapita belum memadai untuk memberikan gambaran tentang kesejahteraan yang

dimaksud. Dalam pengertian yang sangat luas, tidak mungkin untuk menyajikan data statistik yang mampu mengukur tingkat kesejahteraan penduduk secara rinci. Karenanya, indikator yang disajikan dalam publikasi ini hanya mencakup aspek - aspek kesejahteraan yang dapat terukur (*measurable welfare*) saja.

1.4. Sistematika Penulisan

Publikasi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Menyajikan tentang pendahuluan yaitu meliputi latar belakang penulisan, tujuan, ruang lingkup dan sistematika penulisan.
- Bab II Menyajikan tentang metodologi meliputi konsep dan definisi yang digunakan dalam publikasi ini, sumber data dan metode analisis yang digunakan
- Bab III Menyajikan gambaran umum Kabupaten Temanggung dilihat dari sisi geografis dan sosial ekonomi.
- Bab IV Menyajikan analisis dan pembahasan tentang kesejahteraan rakyat meliputi dimensi kependudukan, dimensi pendidikan, dimensi ketenagakerjaan, dimensi kesehatan, fertilitas dan KB, dimensi perumahan dan dimensi konsumsi rumah tangga.
- Bab V Menyajikan kesimpulan dan saran.

BAB II

METODOLOGI

2.1. Konsep dan Definisi

Penduduk adalah setiap orang, baik warga negara Republik Indonesia maupun warga negara asing yang berdomisili di dalam wilayah Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap.

Rasio Jenis Kelamin (RJK) merupakan perbandingan antara penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan, dan bila nilai RJK penduduk di suatu wilayah di atas 100 maka menunjukkan bahwa proporsi penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan penduduk perempuan.

Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun

Penduduk usia belum produktif adalah penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun.

Penduduk usia tidak produktif adalah penduduk yang berusia 65 tahun atau lebih.

Kelahiran adalah anak lahir hidup, yaitu anak yang pada waktu dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan (seperti jantung berdenyut, bernapas, menangis, dan sebagainya), walaupun mungkin hanya beberapa saat saja.

Anak masih hidup adalah semua anak yang dilahirkan dan pada saat pencacahan masih hidup, baik yang tinggal bersama ibunya maupun tinggal di tempat lain.

Kematian adalah suatu peristiwa atau keadaan hilangnya tanda-tanda kehidupan dari seseorang.

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi banyaknya penduduk. Kekuatan yang menambah banyaknya penduduk adalah kelahiran dan migrasi masuk (penduduk datang) sedangkan kekuatan yang mengurangi banyaknya penduduk adalah kematian dan migrasi keluar (penduduk pergi).

Wanita usia subur adalah wanita yang berada pada masa mampu melahirkan atau masa reproduksi (15-49 tahun).

Peserta KB aktif adalah akseptor yang pada saat pencacahan masih aktif mengikuti program KB (memakai alat kontrasepsi).

Akseptor adalah pasangan usia subur yang menggunakan salah satu alat kontrasepsi.

Metode kontrasepsi adalah cara/alat yang dipakai untuk mencegah kehamilan.

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan dan hal lain termasuk yang menderita penyakit kronis tetapi telah sembuh.

Sakit adalah apabila seseorang menderita penyakit kronis atau mempunyai keluhan/gangguan kesehatan lain yang menyebabkan kegiatannya terganggu.

Cara pengobatan adalah perlakuan/cara yang ditempuh seseorang bila menderita suatu penyakit, seperti pergi ke dokter praktek, rumah sakit, puskesmas dan tenaga kesehatan lainnya atau diobati sendiri

Dapat membaca dan menulis adalah mereka yang dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana dengan sesuatu huruf. Orang buta yang dapat membaca dan menulis huruf braille dan orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis kemudian karena cacatnya tidak dapat membaca dan menulis, digolongkan dapat membaca dan menulis. Sedangkan orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis, dianggap tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf).

Penduduk usia sekolah adalah mereka yang pada usia sekolah normal sesuai dengan tingkat pendidikan, seperti penduduk usia SD adalah 7-12 tahun, penduduk usia SLTP adalah 13-15 tahun, dan penduduk usia SLTA adalah 16-18 tahun.

Pendidikan Pra Sekolah, diselenggarakan selama satu sampai dua tahun bagi anak usia 5-6 tahun, yang merupakan persiapan bagi anak sebelum masuk Sekolah Dasar.

Sekolah, adalah sekolah formal mulai dari pendidikan Dasar (SD dan SLTP), pendidikan Menengah (SMK atau SMU), dan

pendidikan Tinggi (Akademi dan Universitas), termasuk pendidikan yang setara, tidak termasuk pendidikan non formal seperti kursus mengetik, komputer, bahasa Inggris, Seskoad, Diklatpim dan sebagainya.

Tamat Sekolah, adalah mereka yang menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun sekolah swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika mengikuti ujian akhir dan lulus dianggap tamat sekolah.

Tidak/belum pernah sekolah adalah mereka yang tidak atau belum pernah sekolah termasuk yang tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak yang tidak/belum melanjutkan ke Sekolah Dasar.

Masih sekolah adalah yang sedang mengikuti pendidikan di pendidikan Dasar, Menengah atau Tinggi.

Tidak sekolah lagi adalah yang pernah mengikuti pendidikan Dasar, Menengah atau Tinggi, tetapi pada saat pencacahan tidak sekolah lagi.

Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki, adalah jenjang sekolah tertinggi yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang baik sudah tamat maupun tidak/belum tamat.

Penduduk yang masih bersekolah adalah yang sedang mengikuti pendidikan ditingkat pendidikan tertentu.

Angka Buta Huruf adalah proporsi penduduk usia tertentu yang tidak dapat membaca dan atau menulis huruf Latin atau huruf lainnya terhadap penduduk usia tertentu.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun atau lebih yang digolongkan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja .

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan yang mencari pekerjaan.

Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang kegiatannya tidak bekerja maupun mencari pekerjaan atau penduduk usia kerja dengan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Mencari Pekerjaan adalah seseorang yang berusaha mendapatkan pekerjaan termasuk yang sedang menunggu jawaban lamaran.

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh dan atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan secara berturut-turut dan tidak terputus. Penghasilan dan keuntungan mencakup upah/gaji termasuk semua tunjangan, bonus, dan hasil usaha berupa sewa, bunga, dan keuntungan baik berupa uang maupun barang.

Hari kerja adalah waktu yang dinyatakan dalam hari yang dipergunakan oleh seseorang untuk melakukan kegiatan bekerja paling sedikit satu jam terus menerus.

Jam kerja adalah Waktu yang dinyatakan dalam jam yang dipergunakan untuk bekerja.

Jam kerja normal adalah 35-44 jam per minggu.

Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah kegiatan seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena sakit, cuti, mogok dan lain-lain. Termasuk juga orang yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja

Luas lantai rumah yang dikuasai rumah tangga, adalah luas lantai bangunan yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Atap rumah, adalah penutup bagian atas suatu bangunan, sehingga yang mendiami dibawahnya terlindung dari terik matahari,

hujan dan sebagainya, untuk bangunan bertingkat atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.

Dinding rumah, adalah batas penyekat dengan rumah tangga dan atau bangunan pihak lain atau sisi luar batas dari bangunan.

Sumber penerangan rumah tangga, adalah penerangan utama yang digunakan dalam ruangan tempat tinggal sehingga dapat melakukan kegiatan.

Fasilitas air minum yang dimiliki, adalah fasilitas air minum yang dimiliki (secara sendiri, bersama, umum, membeli dan lainnya) dan digunakan oleh rumah tangga.

Sumber penggunaan air bersih adalah sumber air terbanyak yang digunakan rumah tangga yang berasal dari ledeng, pompa air, sumur dan mata air terlindung.

Pengeluaran rumah tangga sebulan adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga selama sebulan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan dan bukan makanan yang mencakup semua barang dan jasa yang dikonsumsi tanpa memperhatikan asalnya tetapi terbatas hanya pada barang dan jasa untuk kebutuhan rumah tangga. Dengan perkataan lain, pengeluaran untuk kebutuhan usaha atau diberikan kepada pihak lain tidak dimasukkan ke dalam konsumsi rumah tangga.

2.2. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam publikasi ini adalah Susenas Kabupaten Temanggung Tahun 2014. Berdasarkan kecukupan sampelnya, data Susenas hanya dapat diestimasi hingga tingkat kabupaten. Oleh karenanya, indikator kesejahteraan rakyat yang ditampilkan hanya dapat mewakili sampai dengan tingkat kabupaten saja. Sumber data penunjang yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai instansi, lembaga dan sumber data lainnya.

2.3. Metode Analisis Data

Data dalam publikasi ini disajikan dalam bentuk tabulasi silang. Tabulasi tersebut selanjutnya dianalisis dengan analisis deskriptif.

BAB III

GAMBARAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

3.1. Gambaran Wilayah

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki wilayah seluas 87.065 Ha. Secara Administratif Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 kecamatan, 266 Desa, 23 Kelurahan, 1.385 Dusun, 139 lingkungan, 1.510 Rukun Warga, 5.520 Rukun Tetangga dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Temanggung.

Secara geografis, Kabupaten Temanggung terletak di wilayah tengah Provinsi Jawa Tengah dengan bentangan utara ke selatan sepanjang 46,8 Km dan bentangan timur ke barat sepanjang 43 Km. Kabupaten Temanggung secara astronomis terletak antara 110°23'-110°46'30" Bujur Timur dan 7°14'-7°32'35" Lintang Selatan.

Secara administratif Kabupaten Temanggung di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang yaitu di Kecamatan Bejen, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Gemawang dan Kecamatan Candiroto. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang yaitu di Kecamatan Selopampang, Kecamatan Tlogomulyo, Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Pringsurat. Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo yaitu di Kecamatan Kledung, Kecamatan Ngadirejo dan Kecamatan Wonobojo. Sedangkan di sebelah timur berbatasan

dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang, tepatnya di Kecamatan Kaloran, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Pringsurat.

Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 43,437 km dan jarak terjauh dari utara ke selatan adalah 34,375 km. Sebagian besar wilayah Kabupaten Temanggung merupakan daerah pegunungan, sehingga pada umumnya berhawa dingin (suhu rata-rata berkisar antara 20-30 °C). Sebagaimana wilayah lain di Indonesia, Kabupaten Temanggung beriklim tropis dengan 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Kabupaten Temanggung memiliki topografi yang kompleks dan beranekaragam sesuai dengan tipikal wilayah yang dikelilingi oleh gunung dan pegunungan. Bentuk topografi wilayah berupa dataran, perbukitan, pegunungan, lembah, dan gunung dengan kemiringan antara 0%-70% (datar sampai dengan sangat curam).

Pola topografi wilayah mirip sebuah cekungan raksasa yang terbuka di bagian Tenggara, sedangkan di bagian Selatan dan Barat dibatasi oleh Gunung Sumbing (3.340 m dpl) dan Gunung Sindoro (3.115 m dpl) dan di bagian Utara dibatasi pegunungan kecil yang membujur dari Timur Laut ke arah Tenggara. Sebagian besar wilayah Kabupaten Temanggung berada pada ketinggian 500-1.450 m dpl, wilayah tersebut merupakan daerah lereng Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang terhampar dari sisi Selatan, Barat sampai dengan Utara.

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, maka dalam perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan perencanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah kabupaten yang berbatasan langsung dan perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi.

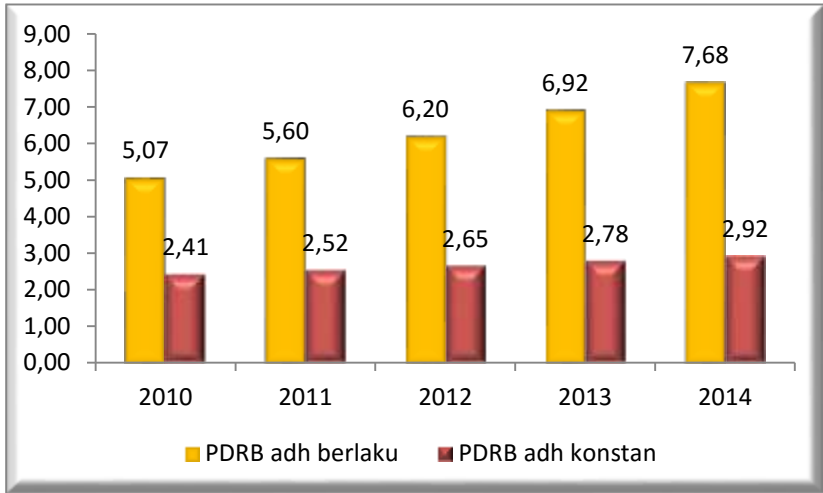
3.2. Gambaran Perekonomian

3.2.1. Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB intinya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu yang digunakan sebagai tahun dasar, sehingga disebut sebagai PDRB riil (Kuncoro, 2013). PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat struktur ekonomi sedangkan PDRB harga konstan

digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Grafik 3.1.
Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Temanggung, 2010 – 2014 (triliun rupiah)



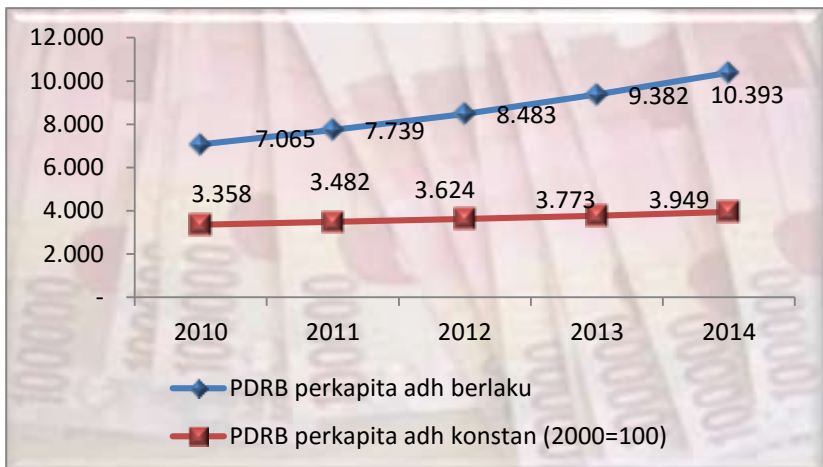
Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Sepanjang tahun 2010 – 2014, besaran PDRB Kabupaten Temanggung, baik atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 7,68 milyar rupiah sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai 2,92 milyar rupiah. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya, maka dapat dilihat bahwa PDRB per kapita penduduk Kabupaten Temanggung

sepanjang 2010 – 2014 mengalami peningkatan baik secara nominal maupun secara riil. Pada tahun 2014, PDRB per kapita penduduk Kabupaten Temanggung mencapai Rp 10.392.591,49 atas dasar harga berlaku atau sebesar Rp 3.948.997,92 atas dasar harga konstan.

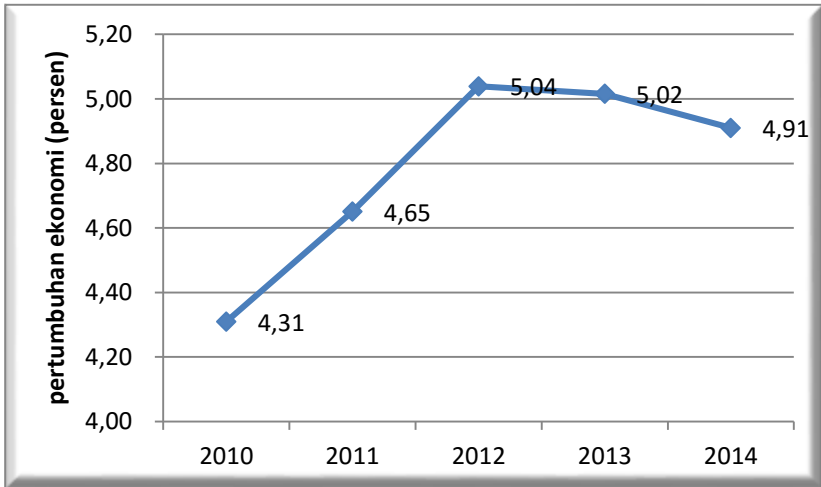
Grafik 3.2.

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Temanggung, 2010 – 2014 (ribu rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Grafik 3.3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung, 2010 - 2014



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan perbandingan pencapaian kinerja ekonomi suatu daerah pada periode waktu tertentu terhadap periode sebelumnya. Sepanjang tahun 2009 hingga 2013, kinerja perekonomian Kabupaten Temanggung selalu tumbuh positif diatas 4 persen. Pertumbuhan paling tinggi dicapai pada tahun 2012 yaitu mencapai 5,04 persen, dan pada tahun 2013 sedikit melambat dengan laju sebesar 5,02 persen. Pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung kembali melambat yaitu hanya sebesar 4,91 persen. Pertumbuhan ekonomi yang melambat akan memberikan dampak baik langsung maupun tidak

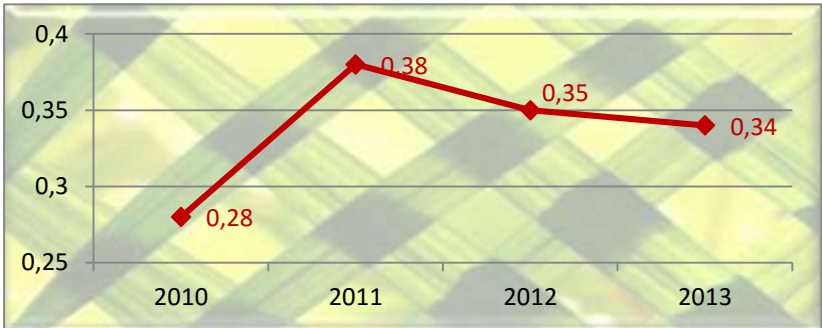
langsung terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Temanggung.

3.2.2. Pemerataan Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belumlah cukup menjadi jaminan bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara merata. Oleh karena itu, laju pertumbuhan ekonomi seyogyanya harus diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan agar hasil - hasil pertumbuhan tersebut dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, sasaran pembangunan tidak hanya berhenti sampai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja seperti yang selama ini dilakukan. Melainkan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperhitungkan pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran. pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas ketika semakin besar masyarakat yang terlibat dan menikmati hasil ekonomi produktif di dalam sistem perekonomian.

Koefisien Gini merupakan koefisien yang digunakan untuk mengukur ketimpangan atau ketidakmerataan agregat yang dapat bervariasi antara 0 sampai satu. Koefisien gini sama dengan 0 menunjukkan adanya pemerataan sepenuhnya, sedangkan koefisien gini sama dengan satu menunjukkan adanya ketidakmerataan distribusi pendapatan.

Grafik 3.4
Gini Rasio Kabupaten Temanggung, 2010 - 2013



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

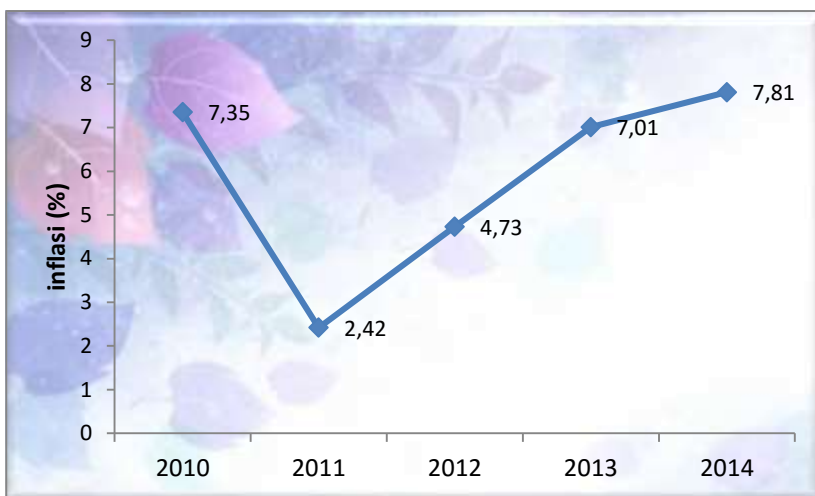
Pada tahun 2010 – 2011, pertumbuhan ekonomi terlihat meningkat namun pada saat yang sama gini rasio juga meningkat yang menunjukkan kesejangan ekonomi semakin melabar. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut laju pertumbuhan kelas menengah ke atas jauh lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan kelas menengah ke bawah.

3.2.3. Inflasi

Selain PDRB, indikator lain yang juga penting dalam perekonomian maupun kesejahteraan rakyat adalah inflasi. Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau

mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Grafik 3.5.
Perkembangan Inflasi di Kabupaten Temanggung, 2010 – 2014



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung

Dalam tingkat daerah, setidaknya ada 2 alasan pentingnya pengendalian inflasi yang didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. *Pertama*, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus

turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. **Kedua**, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. **Ketiga**, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

Dari grafik 3.4. diatas terlihat bahwa inflasi tahunan (*year on year*) sepanjang 2010 – 2014 berada pada nilai 7 persen, kecuali pada tahun 2011, inflasi mencapai titik terendah pada tahun 2011 yaitu hanya 2,42 persen. Para ahli ekonomi mengelompokkan inflasi dibawah 10 persen merupakan inflasi ringan. Inflasi ringan ini dikatakan masih aman dan dapat dikendalikan sehingga belum mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu daerah. Justru inflasi ringan merupakan stimulus bagi dunia usaha untuk meningkatkan produksinya karena harga barang yang semakin meningkat.

3.2.4. Nilai Tukar Petani

Untuk mengetahui keberhasilan dari pembangunan, selain data pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan pula data pengukur tingkat

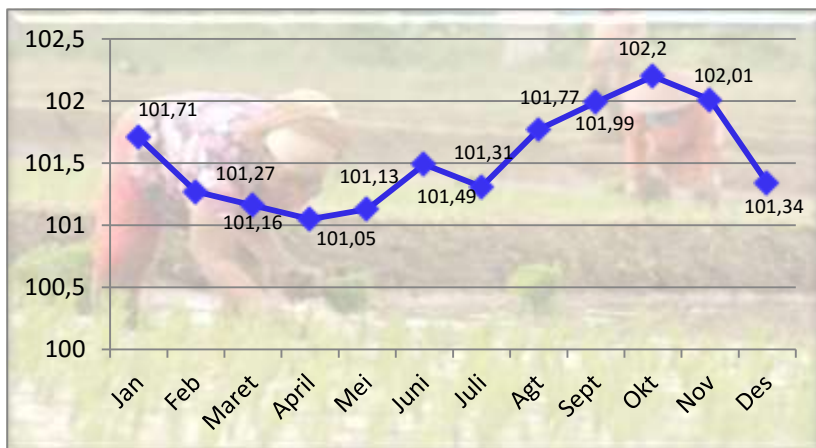
kesejahteraan penduduk khususnya petani. Salah satu indikator yang menunjukkan kesejahteraan petani dan kondisi perekonomian pedesaan adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Secara konseptual NTP adalah pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan kebutuhan dalam memproduksi hasil pertanian. Secara umum penghitungan NTP menghasilkan 3 (tiga) pengertian yaitu :

1. $NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsi. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
2. $NTP = 100$, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
3. $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Nilai Tukar Petani (NTP) juga merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. NTP juga menggambarkan nilai tukar (*term of trade*) dari produksi pertanian terhadap barang/jasa yang dikonsumsi rumah tangga petani dan biaya produksi serta pembentukan barang

modal. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin tinggi kemampuan atau daya beli petani di pedesaan.

Grafik 3.6
Nilai Tukar Petani Kabupaten Temanggung,
Januari – Desember 2014



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Berdasarkan pemantauan harga-harga pedesaan di Kabupaten Temanggung dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2014, menunjukkan bahwa rata-rata nilai tukar petani (NTP) Kabupaten Temanggung diatas angka 100,00 yaitu sebesar 100,53 dengan indeks yang diterima petani (It) sebesar 114,07 dan indeks yang dibayar (Ib) sebesar 112,35. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode Januari sampai dengan Desember petani mengalami surplus atau dengan kata lain nilai yang diterima petani dari hasil produk

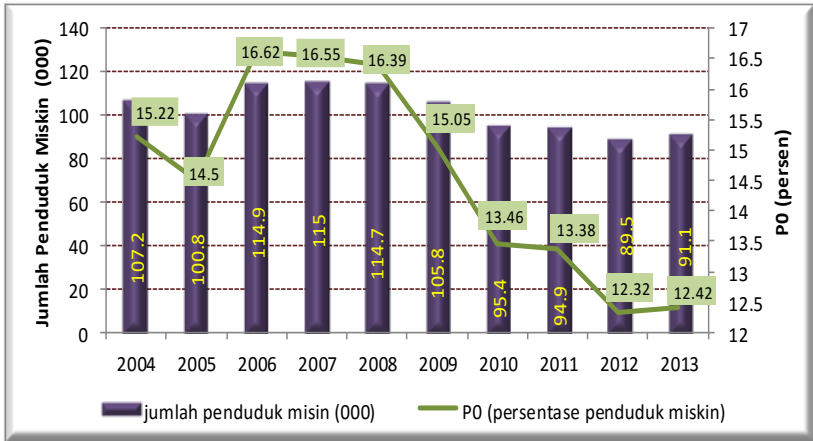
pertanian yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan nilai yang dibayarrumah tangga petani untuk keperluan konsumsi rumah tangga dan biaya produksi serta untuk penambahan barang modalnya.

Bulan dengan NTP tertinggi adalah bulan Oktober dengan NTP sebesar 102,20, sedangkan bulan dengan NTP terendah adalah bulan April dengan NTP 101.05. Selama tahun 2014 terjadi perubahan angka NTP dari bulan ke bulan. Perubahan positif terjadi pada bulan Januari, Mei, Juni, Agustus, September dan Oktober, sedangkan 6 bulan lainnya mengalami perubahan negatif. Perubahan terbesar terjadi dibulan Agustus dengan kenaikan NTP sebesar 0,45 persen, sedangkan perubahan terkecil bahkan terjadi penurunan angka NTP terjadi pada bulan Desember dengan penurunan sebesar 0,65 persen.

3.2.5. Kemiskinan

Keberhasilan pembangunan dapat dinilai secara parsial dengan melihat permasalahan mendasar dalam masyarakat dapat teratasi, diantaranya pengentasan kemiskinan. Idealnya pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan berkurangnya kemiskinan sebagai dampak peningkatan pendapatan per kapita. Penanggulangan kemiskinan merupakan tujuan pertama dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) yang harus dicapai pada tahun 2015.

Grafik 3.7.
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di
Kabupaten Temanggung, 2004 - 2013



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Kemiskinan di Kabupaten Temanggung bergerak secara dinamis namun menunjukkan perkembangan yang baik. Dari tahun 2004-2005, jumlah dan persentase penduduk miskin menunjukkan penurunan. Dampak kenaikan BBM pada tahun 2005 menyebabkan kemiskinan di Kabupaten Temanggung meningkat secara signifikan. Pada tahun 2006, persentase jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 2,12 persen menjadi 16,2 persen. Tingginya kenaikan persentase penduduk miskin tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak penduduk Kabupaten Temanggung yang berada dalam

kelompok hampir miskin. Kelompok penduduk ini sangat sensitif terhadap guncangan perekonomian. Hingga tahun 2008, kemiskinan di Kabupaten Temanggung masih tetap tinggi. Hal ini disebabkan kemiskinan memiliki kelembaman yang tinggi yang ditunjukkan dengan kelambatannya pulih setelah terkena dampak kenaikan harga BBM 2005. Kemiskinan baru menunjukkan penurunan secara perlahan sejak tahun 2009 hingga tahun 2012. Namun demikian, pada tahun 2013, tingkat kemiskinan mengalami sedikit peningkatan yang ditunjukkan dengan meningkatnya persentase penduduk miskin dari 12,32 persen pada 2012 menjadi 12,42 persen pada 2013.

Penanggulangan kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan yang kompleks dan mempunyai dimensi tantangan daerah, nasional dan global. Selain menjadi salah satu tujuan MDGs, penanggulangan kemiskinan juga merupakan salah satu syarat dari pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh bangsa-bangsa di dunia yang tertuang dalam dokumen Johannesburg pada tahun 2002.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Kependudukan

Pergeseran paradigma dari pembangunan yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi ke pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia telah menggeser peran penduduk sebagai subjek pembangunan menjadi sebagai objek atau tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri. Setidaknya ada 3 hal mengapa penduduk suatu daerah memegang peran sentral dalam pembangunan, yaitu:

1. Penduduk objek dan juga sebagai subjek pembangunan seluruh kebijakan dan program pembangunan. Sebagai subyek pembangunan maka penduduk harus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan. Sebaliknya pembangunan juga harus dapat dinikmati oleh penduduk yang bersangkutan. Dengan demikian jelas bahwa pembangunan harus dikembangkan dengan memperhitungkan kemampuan penduduk agar seluruh penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan tersebut. Sebaliknya, pembangunan tersebut baru dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang luas.
2. Keadaan dan kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh

pemerintah. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah, menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan.

3. Dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang sehingga sering kali peranan penting penduduk dalam pembangunan terabaikan. (Tjiptoherijanto, 2002)

Penduduk Kabupaten Temanggung mempunyai ciri-ciri demografis seperti ciri-ciri demografis penduduk Indonesia pada umumnya, yaitu jumlahnya besar, berusia muda, tingkat perkembangan tinggi, perbandingan penyebarannya kurang merata, perbandingan kota dan pedesaan agak timpang dan secara menyeluruh tingkat kondisi sosial ekonomi yang rendah. Untuk mengimbangi hal-hal yang demikian, maka pemerintah telah mengambil kebijakan berupa usaha pembangunan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan penduduk yang besar sekaligus juga untuk menurunkan tingkat perkembangan penduduk.

Pertumbuhan penduduk alami Kabupaten Temanggung pada 2014 mencapai 0,96 persen sedikit turun dibanding pertumbuhan tahun 2013 yang mencapai 0,98 persen. Jumlah penduduk Kabupaten Temanggung pada 2014 mencapai 738 915 terdiri dari 370 398 penduduk laki-laki dan 368 517 penduduk perempuan.

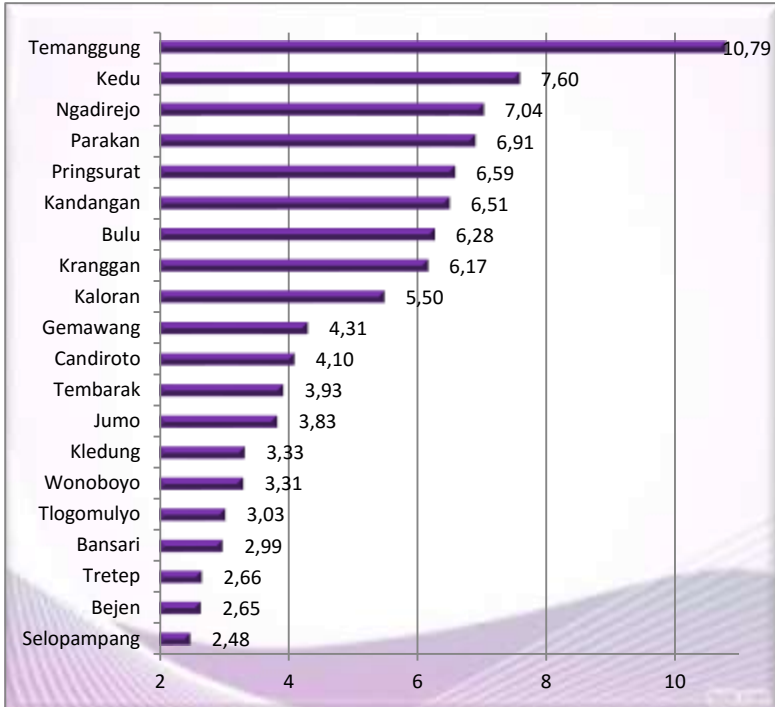
Tabel 4.1.
Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di
Kabupaten Temanggung, 2010 – 2014

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	370 398	368 517	738 915
2013	366 897	365 014	731 911
2012	363 364	361 446	724 810
2011	359 664	357 808	717 472
2010	355 883	354 096	709 979

Sumber: Buku Statistika Kabupaten Temanggung, 2015

Jika dilihat dari persebaran penduduknya, lebih dari 25 persen penduduk di Kabupaten Temanggung terpusat di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Temanggung sebanyak 10,79 persen, Kecamatan Kedu sebanyak 7,60 persen dan Kecamatan Ngadirejo sebanyak 7,04 persen. Sebaran penduduk yang paling kecil adalah Kecamatan Selopampang yaitu sebesar 2,48 persen.

Grafik 4.1
Sebaran Penduduk Kabupaten Temanggung Menurut Kecamatan (persen), 2014

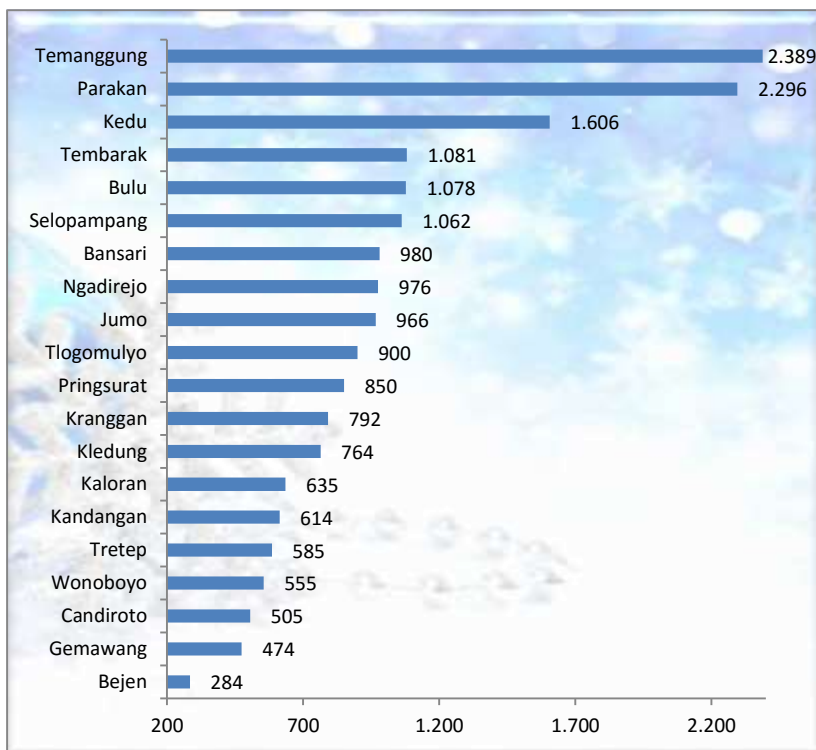


Sumber: Buku Statistik Kabupaten Temanggung, 2015

Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka kepadatan penduduk di Kabupaten Temanggung juga semakin meningkat. Jika pada 2013 terdapat sebanyak 841 jiwa tiap km², pada 2014 rata-rata setiap km² bertambah menjadi 849 jiwa per km². Kecamatan

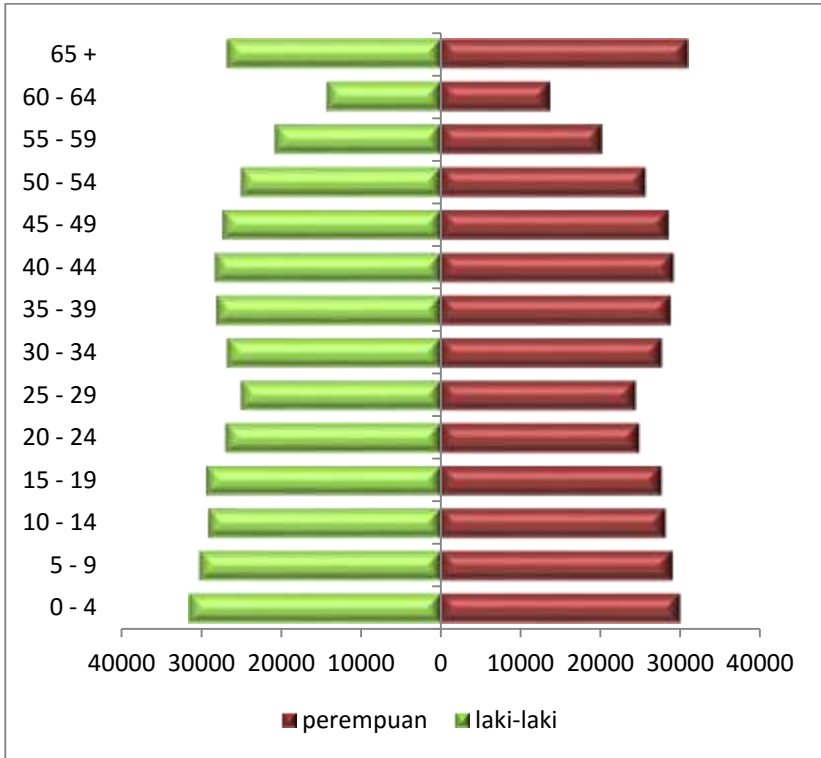
Temanggung dan Kecamatan Parakan merupakan kecamatan yang paling padat penduduknya, yaitu masing-masing sebesar 2 389 orang per km² dan 2 296 orang per km². Sedangkan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Bejen, yaitu hanya 284 orang per km².

Grafik 4.2.
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung (jiwa/km²), 2014



Sumber: Buku Statistika Kabupaten Temanggung, 2015

Grafik 4.3.
Piramida Penduduk Kabupaten Temanggung, 2014



Sumber: Buku Statistik Kabupaten Temanggung, 2015

Daerah yang padat penduduknya cenderung memiliki permasalahan yang lebih kompleks terutama terkait masalah perumahan, kesehatan dan keamanan. Salah satu faktor penyebab

tingginya penduduk di Kecamatan Parakan dan Kecamatan Temanggung adalah tingginya perpindahan penduduk yang umum terjadi baik dari pedesaan ke perkotaan maupun dari daerah miskin ke daerah yang lebih kaya. Karena itu diperlukan upaya menciptakan pembangunan yang merata di setiap daerah baik penyediaan sarana kebutuhan dasar maupun penciptaan lapangan kerja dengan memperhatikan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat ditampilkan dengan menggunakan piramida penduduk. Piramida penduduk memberikan informasi antara lain jumlah penduduk usia kerja, rasio ketergantungan dan jumlah wanita usia subur. Informasi tersebut sangat berguna untuk dasar pelayanan kebutuhan dasar, potensi tenaga kerja maupun kebutuhan lapangan perkerjaan.

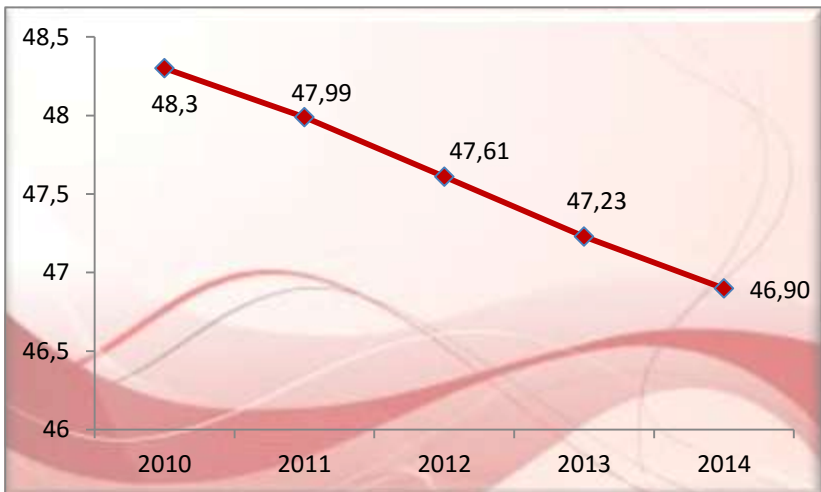
Karakteristik penduduk Kabupaten Temanggung menurut jenis kelamin ditandai dengan angka sex rasio yang berada diatas 100 sepanjang tahun 2010 – 2014. Pada tahun 2014, sex rasio mencapai 100,51, artinya diantara 100 orang perempuan terdapat 100 atau 101 penduduk laki-laki. Hal ini berbeda dengan karakteristik penduduk Provinsi Jawa Tengah pada umumnya dimana lebih banyak penduduk perempuan dibanding penduduk laki-laki.

Salah satu ukuran kependudukan yang dapat dilihat dari piramida penduduk adalah rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan perbandingan antara

penduduk usia non produktif (usia < 15 tahun dan usia > 65 tahun) terhadap penduduk usia produktif (15 – 64 tahun).

Turunnya rasio ketergantungan secara terus menerus merupakan ciri adanya *window of opportunity* yaitu jika jumlah penduduk produktif yang lebih besar dari pada jumlah penduduk non produktif sehingga terjadilah apa yang disebut dengan bonus demografi. Bonus demografi merupakan keuntungan ekonomis dan merupakan momentum untuk meningkatkan investasi di masa depan sehingga investasi tersebut bisa dimanfaatkan ketika jumlah penduduk usia non produktif kembali meningkat.

Grafik 4.4.
Perkembangan Rasio Ketergantungan Kabupaten Temanggung,
2010 - 2014



Sumber : Proyeksi Penduduk *Backcasting*, 2010 - 2014

Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Temanggung sepanjang 2010 – 2014 konsisten mengalami penurunan yaitu sebanyak 47,30 persen pada 2010 menjadi 46,90 persen pada 2014. Berdasarkan rasio ketergantungan tersebut, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Temanggung sedang menuju tahapan bonus demografi dalam proses transisi demografi. Inilah yang disebut sebagai *window of opportunity*, yaitu jika jumlah penduduk produktif yang lebih besar dapat dioptimalkan untuk mengakumulasi pertumbuhan dan kesejahteraan secara ekonomi. Sebaliknya jika *window of opportunity* tersebut tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, maka hal tersebut bisa menjadi *window of disaster*, yaitu apabila jumlah penduduk usia produktif yang banyak tidak bisa dimanfaatkan akibat kurangnya lapangan pekerjaan. *Window of opportunity* merupakan momentum untuk *saving* di masa depan sehingga *saving* tersebut bisa dimanfaatkan ketika jumlah penduduk usia non produktif kembali meningkat.

4.2. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya. Mereka yang mempunyai tingkat pendidikan dan keterampilan yang tinggi mempunyai kemungkinan/peluang lebih

besar untuk memperoleh pendapatan yang tinggi. Sebaliknya, mereka yang mempunyai pendapatan rendah, kecil kemungkinannya untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian dari sudut sosial ekonomi, tingkat pendidikan seseorang merefleksikan tingkat kesejahteraannya.

Menurut Mohammad Ali (2009: 58), pendidikan merupakan sektor yang paling strategis dalam pembangunan nasional pendidikan tidak hanya mempunyai bekal pengetahuan tetapi juga memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembangunan masyarakat. Dengan adanya pendidikan, masyarakat bisa berpikir kreatif dan mampu mengikuti perubahan seperti penggunaan inovasi baru, penerapan teknologi, dan pola pikir yang berorientasi pada pembangunan. Masyarakat yang tidak mampu berubah untuk mengikuti perkembangan zaman akan semakin tertinggal.

Pendidikan di Indonesia pada saat ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam bab IV pasal 6 ayat 1 undang-undang tersebut disebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pasal 11 ayat 2 disebutkan juga bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Hal ini berarti bahwa sudah sepatutnya sudah tidak ada lagi

anak usia 7 – 15 tahun yang tidak bersekolah atau seharusnya tingkat partisipasi sekolahnya 100 persen.

4.2.1. Partisipasi Sekolah

Tabel 4.2.
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Temanggung, 2010 – 2014

kelompok umur	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7 - 12	98,92	99,15	98,43	99,79	99,71
13 - 15	87,65	82,95	86,76	89,26	91,42
16 - 18	43,95	43,24	43,52	47,09	52,80
19 - 24	1,04	5,76	3,07	14,06	17,30

Sumber: Susenas 2014 (BPS Kab. Temanggung)

Secara umum, partisipasi sekolah penduduk usia pendidikan dasar di Kabupaten Temanggung cenderung meningkat. APS penduduk usia 7 – 12 tahun relatif stabil pada 99 persen sedangkan APS penduduk 13 – 15 tahun pada 2014 meningkat menjadi 91,42 persen dibanding tahun sebelumnya. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Partisipasi sekolah penduduk usia 19 – 24 tahun terlihat mulai meningkat 2013 yaitu masing-masing sebesar 14,06 persen dan 17,30 persen. Pada

umumnya pasrtisipasi sekolah pada usia 19 – 24 tahun adalah pada tingkat perguruan tinggi. Artinya baik secara kuantitas maupun kualitas, pendidikan masyarakat Kabupaten Temanggung semakin mengalami peningkatan.

Tabel 4.3.
APK dan APM Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Temanggung, 2010 – 2014

Jenjang Pendidikan	APK					APM				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
SD	108,55	102,71	107,68	112,58	102,16	94,97	93,37	93,14	96,63	97,13
SMP	89,65	92,87	82,28	81,01	80,26	75,92	67,06	68,69	68,38	79,51
SMA	45,91	48,7	49,26	48,55	64,01	36,63	36,71	39,35	38,12	49,72
PT	3,35	7,75	3,94	13,54	15,24	1,04	3,57	2,09	13,25	15,24

Sumber: Susenas 2010 – 2014, BPS Kab. Temanggung

Pada tahun 2014, Angka Partisipasi Kasar untuk jenjang SD dan SMP mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Namun hal tersebut bukan merupakan indikasi penurunan partisipasi sekolah karena indikator Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD dan SMP tetap mengalami kenaikan. Sebanyak 97,13 persen penduduk usia 7 – 12 tahun pada 2014 sedang sekolah di jenjang SD dan sebanyak 79,51 persen penduduk usia 13 – 15 tahun

sedang sekolah pada jenjang SMP. Pada jenjang SMA dan PT, baik APK maupun APM mengalami kenaikan. Artinya semangat dan kemauan masyarakat Temanggung untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat menengah dan atas semakin meningkat.

4.2.2. Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan

Tabel 4.4.
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Temanggung (persen), 2010 - 2014

Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
tidak punya ijazah	27,05	27,07	28,72	30,86	27,00
SD sederajat	34,55	37,68	37,49	37,43	35,40
SLTP sederajat	18,11	20,32	19,39	18,50	20,46
SLTA sederajat	15,36	11,07	11,20	10,01	12,57
PT sederajat	4,93	3,86	3,20	3,20	4,58
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2010 – 2014, BPS Kab. Temanggung

Pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator pokok kualitas pendidikan formal. Tingginya tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh rata-rata penduduk suatu wilayah akan mencerminkan taraf intelektualitas wilayah yang bersangkutan.

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada 2014 masih terdapat 27 persen penduduk usia 10 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah. Jika dilihat dari proporsinya, sepanjang 5 tahun terakhir, sebagian besar penduduk di Kabupaten Temanggung hanya berijazah SD sederajat, yaitu berkisar antara 24 - 38 persen. Wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Temanggung juga terlihat masih belum tercapai, sebagaimana terlihat dari persentase penduduk yang tamat SLTP baru mencapai 20,46 persen pada 2014.

4.2.3. Angka Melek Huruf

Gambaran umum tingkat kecerdasan penduduk suatu daerah dapat ditunjukkan oleh kemampuan baca tulis atau biasa disebut dengan Angka Melek Huruf (AMH). Kemampuan membaca dan menulis merupakan ketrampilan minimum yang dibutuhkan oleh setiap penduduk untuk menuju hidup sejahtera. Dengan kemampuan tersebut seseorang akan lebih mudah dalam mengakses informasi. Selain itu dengan kemampuan tersebut seseorang dapat lebih mudah mempelajari dan menyerap ilmu pengetahuan serta memahami program-program pembangunan. Kemampuan bacatulis tercermin dari angka melek huruf yang didefinisikan melalui besarnya persentase penduduk 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin/lainnya. Indikator ini menggambarkan mutu sumber daya manusia yang diukur melalui aspek pendidikan.

Semakin tinggi nilai indikator ini semakin tinggi mutu sumberdaya manusia suatu masyarakat.

Angka melek huruf penduduk Kabupaten Temanggung mengalami kecenderungan naik sepanjang 2010 – 2014. Persentase penduduk yang masih belum bisa membaca dan menulis berkisar antara 6 – 8 persen. Artinya pemberantasan buta aksara di Kabupaten Temanggung masih menjadi salah satu agenda pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Buta aksara merupakan salah satu faktor terbesar yang menghambat penerimaan informasi dan pengetahuan bagi seseorang.

Tabel 4.5.
Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis di Kabupaten Temanggung, 2010 – 2014 (persen)

Kemampuan Baca Tulis	2010	2012	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
melek huruf	91,02	92,88	93,13
buta huruf	8,98	7,12	6,87
Jumlah	100,00	100,00	100,00

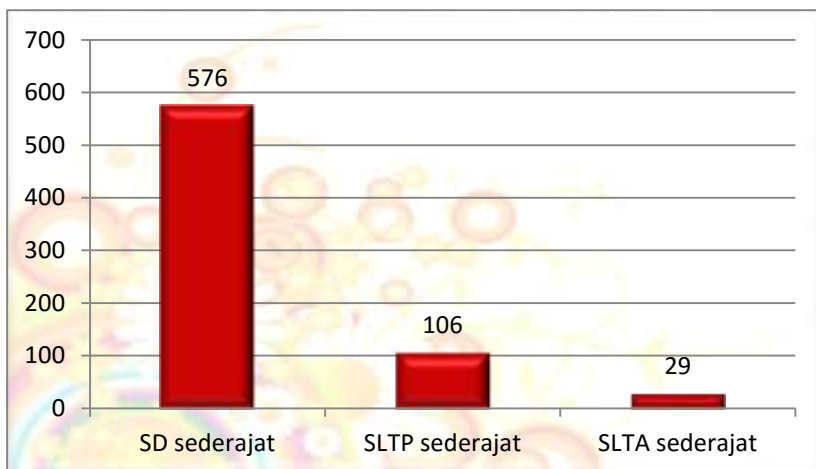
Sumber: Susenas 2014 (BPS Kab. Temanggung)

4.2.4. Fasilitas Pendidikan

Berdasarkan data Dinas Pendidikan pada tahun ajaran 2013/2014, sarana pendidikan yang terdapat di Kabupaten

Temanggung untuk SD/MI ada 576 sekolah, SLTP/MTs ada 106 sekolah dan SLTA/MA ada 29 sekolah. Sementara itu perguruan tinggi yang berada di Kabupaten Temanggung masih sangat terbatas dan jumlahnya hanya 4 perguruan tinggi yaitu 1 di Kecamatan Parakan dan 3 di Kecamatan Temanggung.

Grafik 4.5
Jumlah Fasilitas Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan di
Kabupaten Temanggung, 2014



Sumber: Buku Statistik Kabupaten Temanggung, 2015

4.3. Kesehatan

Masalah kesehatan bagi negara-negara berkembang sangat erat kaitannya dengan mutu sumber daya manusia dimana mutu sumber daya manusia inimerupakan salah satu modal pembangunan. Jaminan

kesehatan yang semakin baik akan menghasilkan kualitas manusia yang baik, danakhirnya akan meningkatkan produktivitas.

Terdapat hubungan timbal balik antara kesehatan rakyat dengan proses pembangunan. WHO (*World Health Organization*) mengungkapkan bahwa kesehatan menyangkut keadaan yang pada umumnya menunjukkan kesejahteraan fisik, mental dan sosial. Kesehatan masyarakat berdasarkan keluhan mereka terhadap gangguan kesehatan atau kejiwaan selama referensi waktu tertentu.

Salah satu perwujudan dari usaha mencapai keadilan sosial adalah dengan mengusahakan kesempatan yang lebih luas bagi setiap warga negaranya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang ada. Perbaikan pemeliharaan kesehatan rakyat dilaksanakan dalam rangka peningkatan dan pemupukan kemampuan tenaga kerja bagi keperluan pembangunan, serta untuk meningkatkan terwujudnya kesejahteraan rakyat. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yakni dibangunnya sarana-sarana kesehatan yang diharapkan dapat merupakan input untuk usaha-usaha kesehatan, sehingga status kesehatan masyarakat akan lebih dapat meningkat seperti yang diharapkan.

4.3.1. Fasilitas Kesehatan

Hingga tahun 2014, di Kabupaten Temanggung terdapat 4 rumah sakit, yaitu 1 rumah sakit yang dikelola pemerintah daerah

dan 3 rumah sakit dikelola oleh swasta. Sejak 2013, kapasitas rumah sakit mengalami peningkatan, yaitu sebelum 2013 kapasitas mencapai 529 pasien, tahun 2013 menjadi 553 pasien dan pada 2014 kembali bertambah menjadi 579 pasien. Selain kemajuan dalam pelayanan rumah sakit, ketersediaan puskesmas di Kabupaten Temanggung juga sudah menjangkau seluruh kecamatan. Bahkan pada beberapa kecamatan terdapat 2 puskesmas yaitu di Kecamatan Parakan, Kecamatan Temanggung, Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Kaloran. Selain itu, juga terdapat 40 Puskesmas Pembantu yang tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Bansari dan Kecamatan Tembarak.

Tabel 4.6.
Banyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut Jenis Fasilitas di Kabupaten Temanggung, 2010 – 2014

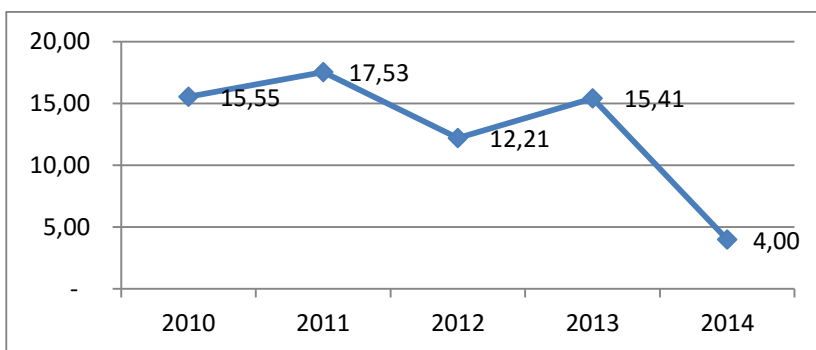
Fasilitas Kesehatan	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rumah sakit	4	4	4	4	4
Puskesmas	23	24	24	24	24
Puskesmas Pembantu	41	40	40	40	40
Posyandu	1486	1485	1498	1497	1495
Klinik Bersalin	1	1	1	1	1
Balai Pengobatan	16	16	16	14	14
Puskesmas Keliling	23	23	24	24	24

Sumber: Buku Statistik Kabupaten Temanggung, 2015

4.3.2. Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah penduduk yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (0-11 bulan) yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Usia bayi sangat rentan terhadap kesakitan maupun kematian. AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan banyak faktor, apabila AKB di suatu wilayah tinggi, berarti status kesehatan di wilayah tersebut rendah.

Grafik 4.6. Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Temanggung, 2010-2014



Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2014 (data diolah)

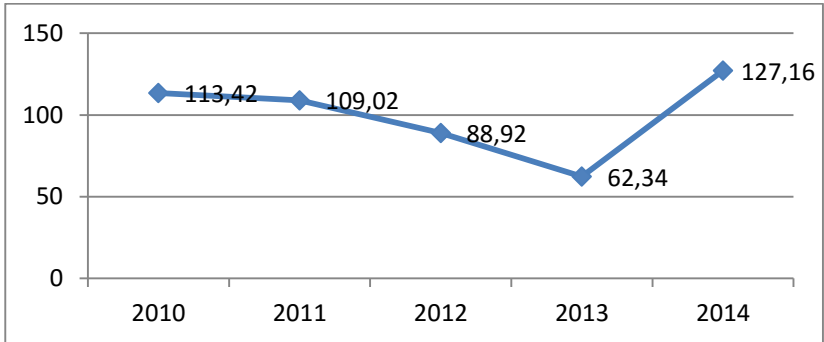
Tren angka kematian bayi terlihat cenderung menurun. Tahun 2011 AKB di Kabupaten Temanggung sebesar 17,53 per 1.000 kelahiran hidup, kemudian menurun menjadi 12,21 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2012. Hanya saja AKB di tahun 2013 sedikit meningkat bila dibandingkan dengan kondisi di tahun 2012,

dimana AKB di tahun 2013 sebesar 15,41 per 1.000 kelahiran hidup dan tahun 2014 AKB berhasil dikurangi, dimana AKB sebesar 4 per 1.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus Insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kelahiran per 1.000 kelahiran hidup. AKI merupakan salah satu target yang telah ditentukan dalam tujuan pembangunan millennium yaitu meningkatkan kesehatan ibu dengan target yang akan dicapai sampai tahun 2015 adalah 102 per 100.000 penduduk. Angka Kematian Ibu mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan kelahiran yang dipengaruhi oleh status gizi ibu, keadaan sosial, ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersediannya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetrik yang masih rendah. Informasi mengenai tingginya AKI bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesejahteraan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas resiko tinggi, program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem

rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi AKI.

Grafik 4.7. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Temanggung, 2010-2014



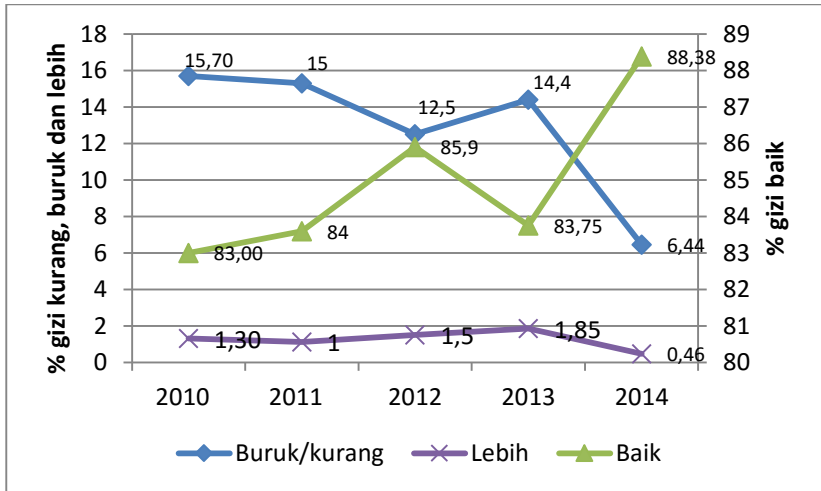
Sumber :Profil Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2014 (diolah)

Dari grafik tersebut, diketahui bahwa Angka Kematian Ibu di Kabupaten Temanggung di tahun 2010 adalah 113,42 per 100.000 kelahiran hidup. Tahun 2011 sebesar 109,02 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian di tahun 2012 menurun, menjadi 88,92 per 100.000 kelahiran hidup, kemudian menurun lagi menjadi 62,34 per 100.000 dan di tahun 2014 jumlah AKI per 100.000 kelahiran hidup menjadi 127,16 per 100.000. Hal ini menunjukkan bahwa Angka Kematian Ibu memiliki trend yang menurun selama 5 tahun terakhir. Artinya Angka Kematian Ibu walaupun selama 2 tahun (2012 dan 2013) mengalami penurunan, namun di tahun 2014 jumlah kenaikan angka

kematian ibu meningkat drastis jika dibandingkan dengan penurunan yang terjadi di 2 tahun sebelumnya (2012 dan 2013).

4.3.3. Status Gizi Balita

Grafik 4.8
Persentase Balita Menurut Status Gizi di Kabupaten Temanggung, 2010 - 2014



Sumber: Buku Statistik Kabupaten Temanggung, 2015

Gizi yang baik adalah salah satu landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan. Dalam siklus kehidupan, usaha perbaikan gizi pada seluruh kelompok umur merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Terdapat dua faktor yang terkait langsung dengan masalah gizi khususnya gizi buruk atau kurang gizi, yaitu intake zat gizi yang bersumber dari makanan dan infeksi penyakit kedua, faktor yang saling mempengaruhi tersebut terkait dengan

berbagai faktor. Penyebab tidak langsung yaitu ketahanan dan keamanan pangan, perilaku gizi, kesehatan badan dan sanitasi lingkungan.

Secara umum, persentase balita gizi baik di Kabupaten Temanggung sepanjang 2010 – 2014 sebagaimana terlihat dalam Grafik 4.6 cenderung mengalami kenaikan, hanya mengalami penurunan pada 2013, namun pada 2014 kembali meningkat dengan persentase balita gizi baik sebesar 88,38 persen sedangkan balita dengan gizi lebih sebesar 0,46 persen.

4.3.4. Pemberian Air Susu Ibu

Tabel 4.7.
Persentase Pemberian ASI pada Balita Usia 2 – 4 Tahun di
Kabupaten Temanggung, 2010 – 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Balita yang pernah disusui	96,20	95,98	97,52	96,81	96,91
Lamanya disusui					
< 24 bulan	68,20	65,17	64,19	42,02	38,06
24 bulan atau lebih	31,80	34,83	35,81	57,98	61,94

Sumber: Susenas 2010 - 2014

Status gizi balita terutama untuk usia 6 – 24 bulan sangat dipengaruhi oleh pemberian ASI eksklusif. Ibu yang memberikan ASI

Eksklusif akan semakin baik status gizi balitanya dari pada ibu yang tidak memberikan ASI Eksklusif kepada balita yang berusia 6 – 24 bulan. ASI merupakan makanan yang higienis, murah, mudah diberikan, dan sudah tersedia bagi bayi. ASI menjadi satu-satunya makanan yang dibutuhkan bayi selama 6 bulan pertama hidupnya agar menjadi bayi yang sehat. Komposisinya yang dinamis dan sesuai dengan kebutuhan bayi menjadikan ASI sebagai asupan gizi yang optimal bagi bayi. ASI memiliki semua unsur-unsur yang memenuhi kebutuhan bayi akan gizi selama periode sekitar 6 bulan, kecuali jika ibu mengalami keadaan gizi kurang yang berat atau gangguan kesehatan lain.

Kesadaran untuk memberikan ASI bagi anaknya di Kabupaten Temanggung semakin meningkat. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa semakin banyak balita yang pernah disusui ibunya. Pada tahun 2014, hanya 3,09 persen balita yang sama sekali tidak pernah disusui ibunya, turun dibanding tahun 2013 yaitu sebanyak 3,19 persen. Bukan hanya pemberian ASI yang semakin meningkat, namun semakin banyak pula balita yang memperoleh ASI hingga 24 bulan atau lebih. Sebanyak 61,94 persen balita usia 2 – 4 tahun memperoleh ASI selama 24 bulan atau lebih. Diharapkan dengan terpenuhinya hak memperoleh ASI bagi bayi, generasi yang akan datang semakin sehat.

4.3.5. Penolong Persalinan

Angka Kematian Ibu (AKI) digunakan sebagai salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat karena ibu hamil dan melahirkan adalah kelompok yang paling rentan yang untuk memerlukan pelayanan maksimal dari petugas kesehatan. Kematian ibu sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan kehidupan anak-anak yang ditinggalkannya. Disamping itu, kematian ibu juga akan berdampak luas terhadap kesehatan dan pendidikan yang dibutuhkan seiring pertumbuhan anak yang ditinggalkannya.

Tabel 4.8.
Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan di Kabupaten
Temanggung, 2010 – 2014

Penolong Persalinan	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dokter	18,40	10,98	13,81	16,23	20,04
Bidan	69,50	79,49	76,61	77,43	77,91
Dukun	11,30	8,56	10,18	6,00	1,36
Famili dan lainnya	0,80	0,97	0,00	0,34	0,69
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2010 - 2014

Berbagai upaya terus diusahakan dalam rangka menurunkan angka kematian ibu. Salah satunya adalah mengimplementasikan program *Safe Motherhood*. *Safe Motherhood* adalah usaha-usaha

yang dilakukan agar seluruh perempuan menerima perawatan yang mereka butuhkan selama hamil dan bersalin. Indikator proses yang penting dalam program *Safe Motherhood* adalah memperhatikan seberapa banyak persalinan yang dapat ditangani, khususnya oleh tenaga kesehatan. Berdasarkan penolong kelahirannya, sebagian besar balita di Kabupaten Temanggung ditangani oleh bidan yaitu sebanyak 77,43 persen pada tahun 2013 dan bertambah menjadi 77,91 persen pada 2014. Persalinan yang ditangani oleh dokter pada tahun 2014 ini mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dari 16,23 persen pada 2013 menjadi 20,04 persen pada 2014. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar persalinan perempuan di Kabupaten Temanggung ditangani oleh tenaga kesehatan terlatih. Dari Tabel diatas juga diketahui bahwa persentase balita yang persalinannya ditolong oleh non medis yaitu dukun, famili dan lainnya semakin menurun. Beberapa alasan yang mendasari naiknya penolong kelahiran oleh petugas medis diantaranya adalah semakin meningkatnya kesadaran tentang arti pentingnya kesehatan, kondisi perekonomian masyarakat yang semakin membaik, akses yang semakin mudah (tersedianya transportasi yang sudah menjangkau sampai ke desa-desa), semakin didekatkannya petugas medis ke tempat tinggal penduduk (yaitu dengan disembarkannya petugas bidan desa), tersedianya puskesmas di tiap-tiap kecamatan yang ada dan semakin murahnya biaya berobat dan didukung dengan jaminan kesehatan yang semakin dinikmati oleh masyarakat.

4.3.6. Angka Harapan Hidup

Grafik 4.9.
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Temanggung dan
Provinsi Jawa Tengah, 2010 - 2014



Sumber : Komponen IPM Metode Baru (BPS, 2014)

Angka Harapan Hidup (AHH) atau yang dikenal juga dengan e_0 , lebih tepatnya disebut dengan Angka Harapan Hidup saat lahir (*life expectancy at birth*). Menurut BPS, AHH (e_0) merupakan rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat. Semakin tinggi AHH maka derajat kesehatan masyarakat semakin baik, begitu pula sebaliknya. Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari

peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu daerah. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Sepanjang 2010 – 2014, angka harapan hidup penduduk Kabupaten Temanggung selalu mengalami peningkatan yaitu dari 75,17 tahun pada 2010 menjadi 75,34 tahun pada 2014. Berdasarkan indikator ini, derajat kesehatan penduduk Kabupaten Temanggung lebih baik daripada penduduk Provinsi Jawa Tengah pada umumnya. Jika pada tahun 2010 angka harapan hidup Kabupaten Temanggung sudah mencapai 75,17 tahun, rata-rata angka harapan hidup penduduk Provinsi Jawa Tengah pada 2014 baru mencapai 73,88 tahun. Artinya pembangunan kesehatan di Kabupaten Temanggung sudah cukup baik dibanding daerah lain di Provinsi Jawa Tengah.

4.4. Fertilitas dan Keluarga Berencana

Fertilitas atau kelahiran merupakan salah satu faktor penambah jumlah penduduk disamping migrasi masuk. Kelahiran bayi membawa konsekuensi pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang bayi tersebut, termasuk pemenuhan gizi dan kecukupan kalori, perawatan kesehatan. Pada gilirannya, bayi ini akan tumbuh menjadi

anak usia sekolah yang menuntut pendidikan, lalu masuk angkatan kerja dan menuntut pekerjaan. Bayi perempuan akan tumbuh menjadi remaja perempuan dan perempuan usia subur yang akan menikah dan melahirkan bayi. Pengetahuan tentang fertilitas atau kelahiran dan KB serta indikator-indikatornya sangat berguna bagi para penentu kebijakan dan perencana program untuk merencanakan pembangunan sosial terutama kesejahteraan Ibu dan anak.

Tabel 4.9.

Jumlah Wanita 15 - 49 tahun Berstatus Pernah Kawin, Anak Lahir Hidup dan Rata-Rata Anak Lahir Hidup di Kabupaten Temanggung, 2011 - 2014

tahun	jumlah wanita 15 - 49 tahun berstatus pernah kawin	anak lahir hidup	rata-rata anak lahir hidup
(1)	(2)	(3)	(4)
2011	162 727	314 588	1,93
2012	161 201	305 464	1,89
2013	154 255	292 812	1,90
2014	158 491	307 937	1,94

Sumber : Susenas 2011 – 2014

Indikator yang paling sederhana untuk mengukur fertilitas adalah anak lahir hidup atau *Children Ever Born (CEB)*. CEB mencerminkan banyaknya kelahiran sekelompok atau beberapa wanita selama reproduksinya atau disebut sebagai paritas. Berdasarkan indikator ini, angka kelahiran penduduk Kabupaten

Temanggung sudah cukup rendah. Tabel berikut ini menunjukkan bahwa sejak tahun 2011 – 2014, rata – rata anak yang dilahirkan hidup oleh perempuan usia 15 – 49 tahun yang berstatus pernah kawin sudah berada dibawah 2.

Tabel 4.10.
Rata – Rata Umur Perkawinan Pertama di Kabupatèn
Temanggung, 2011 – 2014

tahun	rata-rata usia perkawinan pertama
(1)	(2)
2011	19,08
2012	19,14
2013	19,70
2014	19,51

Sumber: Susenas 2011 – 2014

Ada dua faktor yang mempengaruhi tingkat fertilitas di suatu daerah yaitu program Keluarga Berencana (KB) dan penundaan usia perkawinan pertama pada wanita. Penundaan usia perkawinan pertama akan memperpendek masa reproduksi mereka. Wanita yang kawin pada usia sangat muda mempunyai resiko cukup besar pada saat mengandung dan melahirkan yang berdampak terhadap keselamatan ibu maupun anak. Dengan memberi kesempatan kepada wanita untuk bersekolah lebih tinggi dapat membantu menunda usia perkawinan bagi seorang wanita, terutama di daerah pedesaan.

Rata – rata umur perkawinan pertama perempuan di Kabupaten Temanggung pada 2011 – 2012 sudah mencapai 19 tahun dan pada 2013 – 2014 terlihat mendekati usia 20 tahun. Usia perkawinan pertama perempuan memiliki kaitan erat dengan kondisi yang lain. Dengan menunda usia perkawinan pertama, maka perempuan akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi maupun memasuki pasar kerja. Dengan usia perkawinan pertama yang lebih tinggi maka perempuan memiliki lahir batin yang lebih matang untuk menikah, berumah tangga dan melahirkan sehingga angka kematian ibu dan bayi dapat menurun dan anak-anak yang dilahirkan juga akan semakin berkualitas.

Keluarga Berencana adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami isteri untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiranyang memang diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan usia suamiisteri, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga.

Pengetahuan tentang Keluarga Berencana (KB) memberi bekal kepada pasangan suami istri mengenai usia terbaik hamil pertama kali, kapan berhenti melahirkan, berapa tahun jarak ideal antara anak yang satu dengan berikutnya dan jumlah anak yang ideal. Pasangan Usia Subur (PUS) paham bahwa kehamilan terlalu muda

atau terlalu tua tidaklah baik bagi kesehatan bayi dan ibunya. Wanita yang belum berusia 20 tahun belum siap untuk hamil, baik dari segi fisik maupun psikis. Kemungkinan besar bayi yang lahir akan menderita berat badan lahir rendah (BBLR), yaitu berat badan bayi pada saat lahir kurang dari 2.500 gram. Begitu pula bila kehamilan terjadi pada wanita usia 35 tahun keatas, resiko kematian juga tinggi baik untuk ibu maupun janin.

Partisipasi KB penduduk Kabupaten Temanggung sepanjang lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Jika pada 2010 persentase wanita Usia 10 – 49 tahun yang pernah kawin dan pernah berpartisipasi KB baru mencapai 83,80 persen, pada tahun 2014 telah mencapai 87,23 persen. Dari wanita yang pernah menggunakan KB tersebut, pada 2013 – 2014 persentase yang sedang menggunakan KB berkisar antara 77 – 78 persen. Artinya masih ada sebanyak 22 – 23 persen wanita usia subur dan berstatus pernah kawin yang tidak sedang menggunakan KB.

Jika dilihat berdasarkan jenis/alat kontrasepsinya, suntikan masih menjadi pilihan utama mayoritas bagi peserta KB. Pada 2014, peserta akseptor KB yang menggunakan suntikan sebesar 45,56 persen diikuti susuk sebesar 25,97 persen. Sepanjang 5 tahun terakhir juga terlihat semakin banyak akseptor KB yang menggunakan IUD/spiral, yaitu dari 11,80 persen pada tahun 2010 menjadi 15 persen pada 2014. Semakin meningkatnya penggunaan IUD antara lain karena alat ini tidak menyebabkan efek samping hormonal.

Tabel 4.11
 Persentase Wanita Pernah Kawin Usia 10 – 49 Tahun Menurut
 Partisipasi KB dan Jenis/Alat Kontrasepsi yang Digunakan di
 Kabupaten Temanggung, 2010 – 2014

Uraian	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Partisipasi KB (%)					
Pernah KB	83,80	86,96	87,42	87,19	87,23
Tidak Pernah KB	16,20	13,04	12,58	12,81	12,77
Pernah KB (%)					
Sedang KB	81,04	69,65	73,18	78,72	77,15
Tidak Aktif KB lagi	18,95	30,35	26,28	21,28	22,85
Alat Kontrasepsi (%)					
IUD/Spiral	11,80	13,7	13,21	12,47	15,00
PIL	3,80	7,57	6,98	5,30	5,80
Kondom	0,90	0,67	1,89	1,11	1,56
Suntikan	53,60	48,35	53,16	49,12	45,56
Tubektomi	3,40	6,35	4,31	7,17	4,88
Vasektomi	1,10	0,2	0,83	0,33	0,25
Susuk	24,80	22,04	19,09	23,63	25,97
Tradisional	0,60	1,13	0,56	0,87	0,97

Sumber: Susenas 2010 – 2014

Hingga 2014, partisipasi kaum pria dalam KB masih sangat kecil. Sepanjang lima tahun terakhir, persentase pengguna kondom dan vasektomi masih dibawah 2 persen. Rendahnya partisipasi pria dalam program KB anatar lain disebabkan karena kondisi lingkungan sosial, budaya, masyarakat, dan keluarga yang masih menganggap

partisipasi pria belum penting dilakukan, pandangan bahwa KB hanya merupakan tanggung jawab perempuan, pengetahuan dan kesadaran pria dan keluarga mengenai KB masih relatif rendah, serta ada keterbatasan penerimaan dan aksesibilitas pelayanan kontrasepsi pria.

4.5. Pentahapan Keluarga Sejahtera

Tabel 4.12
Perkembangan Pentahapan Kelurga Sejahtera di Kabupaten Temanggung, 2010 – 2014

Tahun	Jumlah (%)	Pra Sejahtera	Sejahtera I	Sejahtera II	Sejahtera III	Sejahtera III PLUS	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2010	jumlah	53 744	20 919	46 075	86 300	2 893	209 931
	%	25,60	9,96	21,95	41,11	1,38	100,00
2011	jumlah	50 752	19 147	46 952	97 362	3 504	217 717
	%	23,31	8,79	21,57	44,72	1,61	100,00
2012	jumlah	51 172	24 891	36 505	100 518	4 598	217 684
	%	23,51	11,43	16,77	46,18	2,11	100,00
2013	jumlah	48 044	23 207	41 070	101 512	5 765	219 598
	%	21,88	10,57	18,70	46,23	2,63	100,00
2014	jumlah	53 866	28 814	31 568	102 280	7 981	224 509
	%	23,99	12,83	14,06	45,56	3,55	100,00

Sumber: Buku Statistik Kabupaten Temanggung, 2015

Penanggulangan kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan yang kompleks dan mempunyai dimensi tantangan daerah, nasional dan global. Selain menjadi salah satu tujuan MDGs, penanggulangan kemiskinan juga merupakan salah satu syarat dari

pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh bangsa-bangsa di dunia yang tertuang dalam Dokumen Johannesburg pada tahun 2002.

Kemiskinan juga dapat diukur berdasarkan pentahapan kesejahteraan keluarga yang di menjadi 5 kelompok yaitu keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I, keluarga sejahtera II, keluarga sejahtera III dan keluarga sejahtera III plus. Kesejahteraan keluarga tidak hanya menyangkut kemakmuran saja, melainkan juga harus secara keseluruhan. Pembangunan keluarga sejahtera diarahkan pada terwujudnya keluarga sebagai wahana peresmian nilai-nilai luhur budaya bangsa guna meningkatkan kesejahteraan keluarga serta membina ketahanan keluarga agar mampu mendukung kegiatan pembangunan.

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic need*) secara minimal, seperti kebutuhan akan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan KB. Keluarga sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Keluarga Sejahtera II adalah keluarga disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi. Keluarga Sejahtera III adalah keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial

psikologis dan perkembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Keluarga sejahtera III plus adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosial, psikologis dan perkembangan keluarganya serta telah dapat memberikan sumbangan yang teratur dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan atau memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

Berdasarkan definisi tersebut, maka sebagian besar penduduk Kabupaten Temanggung merupakan keluarga sejahtera III. Persentase keluarga sejahtera III pada 2010 mencapai 41,11 persen terus meningkat menjadi 46,23 persen pada 2013, dan sedikit menurun pada 2014 yaitu hanya 45,56 persen. Meskipun demikian, persentase keluarga sejahtera III plus justru konsisten mengalami peningkatan. Jika pada 2010 persentase keluarga sejahtera III plus baru mencapai 1,38 persen, pada 2014 telah mencapai 3,55 persen, meningkat cukup tajam dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 2,63 persen. Artinya semakin banyak keluarga di Kabupaten Temanggung yang tidak hanya terpenuhi kebutuhan dasar, sosial dan psikologisnya namun juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

Berdasar pentahapan keluarga sejahtera ini, ada hal yang perlu diwaspadai terhadap kemungkinan meningkatnya insiden kemiskinan di Kabupaten Temanggung. Pada 2014, terjadi penurunan persentase keluarga dalam tahap sejahtera II dan sejahtera

III, namun pada saat bersamaan ternyata terjadi peningkatan persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I. Dengan asumsi jumlah keluarga tidak berubah secara signifikan, maka perubahan ini menjadi indikasi awal jika sebagian keluarga yang berstatus sejahtera II dan sejahtera III pada 2014 menurun menjadi pra sejahtera dan sejahtera I. Hal ini perlu menjadi “*early warning*” agar tidak berujung pada meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Temanggung.

4.6. Ketenagakerjaan

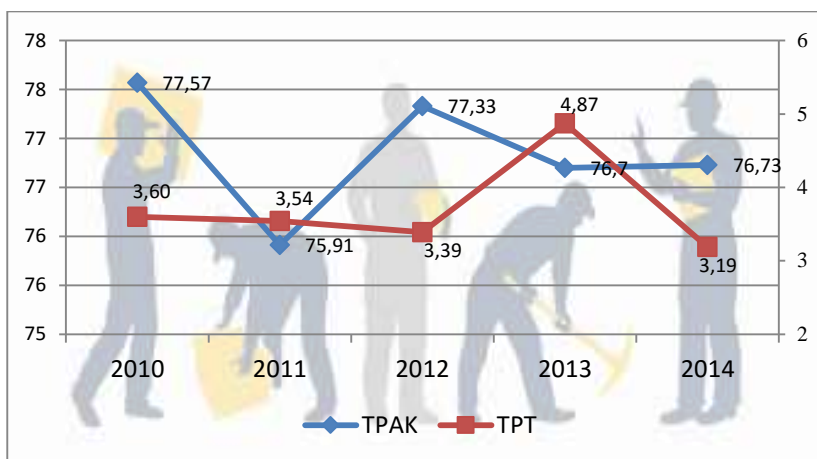
Dalam merencanakan pembangunan yang berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja, diperlukan suatu perencanaan tenaga kerja (*manpower planning*) yang tepat. Suatu daerah harus bisa memperkirakan jumlah tenaga kerja sesuai dengan kualitas tenaga kerja dan keperluan sektoral minimal sampai dengan lima tahun mendatang. Kualitas tenaga kerja berhubungan dengan apa yang disebut sebagai “*human capital*”. Ciri khusus yang dimiliki oleh faktor produksi ini adalah jika sering dipakai mereka tidak akan hilang atau berkurang. Dengan semakin sering faktor produksi ini dipakai bukannya semakin berkurang tetapi justru sebaliknya dan bahkan nilainya menjadi semakin tinggi pula.

Identifikasi dan kuantifikasi dalam pasar tenaga kerja seperti underutilisasi tenaga kerja dan defisit pekerjaan yang layak (*decent work*) adalah langkah pertama dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

pekerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam perencanaan tenaga kerja antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Daya Serap Tenaga Kerja, Produktivitas Pekerja, maupun tingkat pengangguran.

4.6.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Grafik 4.10.
Perkembangan TPAK dan TPT di Kabupaten Temanggung,
2010 – 2014



Sumber: Sakernas *Backcasting*, 2010 – 2014

Pembangunan banyak dipengaruhi oleh hubungan antara manusia dengan faktor-faktor produksi yang lain, ketersediaan pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi dapat dilihat dari besarnya keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi. Suatu indikator yang biasa digunakan untuk mengukur hal tersebut adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK

memberikan gambaran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja baik dengan bekerja maupun mencari pekerjaan yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa.

TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja selama periode tertentu. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan penganggur. Sedangkan penduduk usia kerja dengan kegiatan selain kegiatan tersebut dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja. Sepanjang lima tahun terakhir, kondisi ketenagakerjaan penduduk Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi. TPAK tertinggi terjadi pada 2010, yaitu mencapai 77,57 persen, kemudian pada 2011 turun menjadi titik terendah selama 5 tahun tersebut, yaitu sebesar 75,91 persen. Pada 2012, TPAK mengalami peningkatan menjadi 77,33 persen namun kembali turun menjadi 76,70 persen pada 2013 dan 76,73 persen pada 2014.

4.6.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan antar jumlah angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang pertama kali maupun yang sudah pernah bekerja sebelumnya, dengan jumlah seluruh angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka selalu berbanding terbalik dengan tingkat kesempatan kerja.

Tingkat Kesempatan Kerja menggambarkan besarnya penyerapan pasar tenaga kerja terhadap angkatan kerja. Semakin tingginya besaran tingkat pengangguran terbuka mencerminkan semakin rendahnya besaran tingkat kesempatan kerja, demikian sebaliknya semakin rendah tingkat pengangguran terbuka mencerminkan semakin tingginya besaran tingkat kesempatan kerja.

Dari Grafik 4.8 sebelumnya dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Temanggung sepanjang lima tahun terakhir mengalami puncak pada tahun 2013 yaitu mencapai 4,87 persen. Melemahnya kondisi perekonomian berujung pada tingginya angka pengangguran. Pada 2014, angka pengangguran turun kembali menjadi 3,19 persen. Menurunnya angka pengangguran ini menunjukkan meningkatkan aktivitas ekonomi di Kabupaten Temanggung.

Rendahnya angka tingkat pengangguran ini belum mencerminkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai karena angka tingkat pengangguran terbuka hanya memperhitungkan aspek pencari kerja saja. Sementara penduduk yang sudah bekerja namun dibawah jam kerja normal belum diperhitungkan.

Tabel 4.13
 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja
 selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Temanggung, 2014

Jam Kerja	persentase
(1)	(2)
sementara tidak bekerja	1,60
< 35 jam	25,88
>=35 jam	72,52
jumlah	100,00

Sumber : Sakernas 2014

Pekerja yang bekerja dibawah jam kerja normal ini biasa tergolong dalam kategori setengah pengangguran. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 25,88 persen penduduk yang bekerja memiliki jam kerja dibawah 35 jam selama seminggu. Hal ini semakin menegaskan bahwa masih banyak penduduk di Kabupaten Temanggung yang bekerja di sektor informal. Mereka yang bekerja di sektor informal cenderung bekerja dengan jam kerja dan penghasilan yang tidak menentu. Dominannya sektor pertanian juga mendukung angka setengah pengangguran. Setengah penganggur disektor pertanian terjadi karena kepemilikan tanah yang terbatas. Selain itu, sektor pertanian juga merupakan sektor yang banyak menyerap pekerja keluarga maupun pekerja dengan keahlian dan tingkat pendidikan rendah, meskipun dengan konsekuensi.

4.6.3. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja adalah komposisi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan. Selain itu, indikator tersebut juga mencerminkan struktur perekonomian suatu wilayah. Untuk mengetahui sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja perlu dilakukan analisis mengenai lapangan pekerjaan.

Grafik 4.11.

Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Temanggung, 2011 & 2014



Banyaknya penduduk yang bekerja di Kabupaten Temanggung menurut lapangan usaha dapat memberikan informasi awal tentang potensi ekonomi penduduk Temanggung. Semakin banyak orang yang bekerja di suatu sektor, maka semakin tinggi pula potensi ekonomi sektor tersebut. Sebagian besar penduduk yang bekerja di Kabupaten Temanggung bekerja pada sektor pertanian.

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa struktur penyerapan tenaga kerja pada tahun 2014 memiliki pola yang sama dengan

struktur penyerapan tenaga kerja pada tahun 2011. Tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian tersebut terkait erat dengan tingginya potensi agraris yang sangat tinggi di Kabupaten Temanggung. Selain itu, sektor pertanian relatif lebih akomodatif, karena tidak membutuhkan SDM tingkat pendidikan yang lebih tinggi, keahlian khusus serta kemampuan modal untuk usaha yang rendah. Oleh karenanya tidak mudah bagi tenaga kerja di sektor pertanian untuk berpindah ke sektor lainnya.

Sektor perdagangan juga terlihat semakin menunjukkan perannya dalam perekonomian Kabupaten Temanggung. Daya serap tenaga kerja pada sektor perdagangan tahun 2011 mencapai 14,35 persen dan mengalami peningkatan hingga mencapai 17,05 persen pada 2014. Sebaliknya sektor industri pada tahun 2014 menyerap tenaga kerja yang lebih sedikit dibanding tahun 2011, yaitu sebanyak 21,42 persen menjadi 18,53 persen.

Dalam kerangka keterkaitan antar sektor, sektor industri dan sektor perdagangan merupakan sektor yang memiliki mempunyai keterkaitan ke belakang dengan sektor primer sebagai penyedia input dan juga memiliki keterkaitan ke depan dengan sektor lain sebagai pengguna *output*-nya. Oleh karena itu, pengembangan kedua sektor tersebut akan memberikan *multiplier* yang lebih besar baik terhadap penyerapan tenaga kerja maupun terhadap peningkatan output.

Sumber daya alam yang berlimpah di Kabupaten Temanggung memang merupakan salah satu modal bagi pembangunan perekonomian. Namun perekonomian yang hanya bergantung pada alam saja akan menciptakan nilai tambah yang lebih sedikit dan tidak berlangsung dalam jangka panjang. Oleh karenanya diperlukan faktor produksi lain yaitu SDM yang berkualitas dan teknologi yang tinggi agar sumber daya alam tersebut masuk ke dalam proses produksi lebih lanjut sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4.14.
 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan di
 Kabupaten Temanggung, 2011 – 2014

Status pekerjaan	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Berusaha sendiri	10,31	12,60	13,14	12,88
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	26,75	26,33	28,77	26,32
Berusaha dibantu buruh tetap	1,59	1,20	2,19	1,58
Buruh/karyawan	18,16	16,25	23,55	19,60
Pekerja bebas di pertanian	3,66	3,77	5,00	2,63
Pekerja bebas di non pertanian	5,65	7,48	4,09	7,08
Pekerja tak dibayar	33,89	32,37	23,25	29,91
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Sakernas *Backcasting* 2011 - 2014

Penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama menggambarkan perkembangan tenaga kerja terhadap tingkat kemandirian dan tingkat kebutuhannya terhadap tenaga orang lain.

Status pekerjaan juga dapat digunakan untuk membedakan tenaga kerja formal dan informal. Status pekerjaan berusaha dibantu dengan buruh tetap dan buruh/karyawan dipakai sebagai proksi pekerja sektor formal sedangkan status pekerjaan sebagai berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, pekerja bebas dan pekerja tidak dibayar digunakan sebagai proksi pekerja sektor informal.

Gambaran sektor formal-informal juga dapat menjadi sinyal perekonomian negara. Semakin maju perekonomian, semakin besar peranan sektor formal. Sampai dengan 2014, sektor informal masih mendominasi kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Temanggung dengan kontribusi 70 – 80 persen. Sebagian orang menyebut sektor informal sebagai sektor penyelamat. Elastisitas sektor informal dalam menyerap tenaga kerja menjadikan sektor ini selalu bergairah meskipun nilai tambah yang diciptakannya mungkin tidak sebesar nilai tambah sektor formal.

4.7. Perumahan

Rumah merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, disamping pakaian dan makanan. Berdasarkan sifatnya tersebut, maka permintaan unit rumah akan terus terjadi dan meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Di sisi lain, meningkatnya permintaan tersebut harus diimbangi dengan penyediaan akan kebutuhan perumahan penduduk minimal rumah layak huni. Dengan

demikian, rumah layak huni yang diidam-idamkan penduduk dapat terpenuhi untuk kelangsungan kehidupannya.

Dalam Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang dilaksanakan oleh BPS dikumpulkan beberapa informasi penting mengenai keadaan perumahan antara lain adalah luas lantai, bahan bangunan utama atap, lantai dan dinding rumah terluas, sumber penerangan utama, sumber air minum utama, sumber air utama untuk memasak/mandi/cuci, jarak pompa/sumur/mata air ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat, dan fasilitas tempat buang air besar.

Kondisi dan kualitas rumah yang ditempati dapat menunjukkan keadaan sosial ekonomi rumahtangga. Semakin baik kondisi dan kualitas rumah yang ditempati menunjukkan semakin baik keadaan sosial ekonomi rumah tangga.

Rumah tidak hanya sebagai tempat berlindung, tetapi juga sebagai tempat tinggal, penunjang identitas (*identity*) keluarga yang diwujudkan pada kualitas hunian atau perlindungan yang diberikan oleh rumah oleh karena itu aspek kesehatan dan kenyamanan, bahkan estetika menjadi penentu kualitas tempat tinggal, juga sebagai indikator kesejahteraan bagi penghuninya.

Secara umum, kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan dan fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan tingkat kesejahteraan, oleh karena itu, keadaan dan kualitas serta fasilitas lingkungan perumahan

merupakan faktor yang sangat penting karena dapat memberikan sumbangan dalam kenyamanan hidup sehari-hari.

Pada tahun 2014 menunjukkan bahwa 91,84 persen rumah tangga di Kabupaten Temanggung menempati tempat tinggal dengan status milik sendiri, sedikit menurun dibanding tahun 2013 yang mencapai 93,93 persen. Rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal milik orang tua/saudara cenderung mengalami peningkatan sepanjang 5 tahun terakhir yaitu dari 3,60 persen dari 2010 menjadi 5,83 persen pada tahun 2014.

Tabel 4.15.
Persentase Rumah Tangga menurut Penguasaan Bangunan
Tempat Tinggal yang Dihuni di Kabupaten Temanggung, 2010 - 2014

Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Milik Sendiri	93,20	94,40	94,70	93,93	91,84
Kontrak/Sewa	2,30	0,80	1,60	1,01	1,37
Bebas Sewa	0,40	1,00	0,30	0,56	0,84
Milik orang tua/saudara	3,60	3,60	3,40	4,02	5,83
Lainnya	0,50	0,20	0,00	0,48	0,12
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2010 - 2014

Kualitas rumah ditentukan oleh bahan bangunan yang digunakan dan fasilitas yang tersedia. Kondisi perumahan : atap rumah, jenis dan luas lantai, jenis dinding, ketersediaan air bersih dan tempat pembuangan kotoran.

Atap merupakan elemen vital pada bangunan konstruksi sebuah tempat tinggal karena berada di atas, untuk menutupi seluruh bagian rumah itu sendiri dari terik matahari, hujan dan sebagainya. Jenis atap rumah yang dipakai oleh masyarakat Temanggung adalah genteng, seng, beton dan lainnya. Termasuk rumah dengan atap genteng adalah rumah yang menggunakan atap dari genteng yang terbuat dari tanah liat yang dicetak dan dibakar, genteng beton, genteng *fiber cement* dan genteng keramik. Rumah dengan atap seng bisa berbentuk seng rata, seng gelombang, termasuk genteng seng yang lazim disebut dengan *decrabond* (seng yang dilapisi *epoxy* dan *acrylic*). Jenis atap selain genteng, seng dan beton dikelompokkan ke dalam jenis atap lainnya. Sedangkan yang termasuk jenis atap lainnya adalah atap yang terbuat dari sirap, ijuk, rumbia dan daun-daunan lainnya.

Tabel 4.16.
 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap
 Rumah yang Dihuni di Kabupaten Temanggung, 2010 - 2014

Jenis Atap	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Beton	1,70	3,10	2,20	4,08	3,02
Genteng	97,00	92,70	94,80	91,38	91,85
Seng	0,90	4,20	2,50	4,07	3,61
Lainnya	0,40	0,00	0,60	0,47	1,52
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber :Susenat 2010 - 2014

Selama lima tahun terakhir persentase tertinggi penduduk Kabupaten Temanggung yang menggunakan atap genteng ada di tahun 2010 yaitu sebesar 97,00 persen. Rumah dengan atap beton menempati urutan kedua terbanyak setelah rumah dengan jenis atap genteng, yaitu sekitar 3,02 persen. Jumlah rumah dengan atap seng menempati urutan berikutnya dengan besaran kisaran 3,61 persen.

Tabel 4.17
 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding
 Rumah yang Dihuni di Kabupaten Temanggung, 2010 - 2014

Jenis Dinding	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tembok	68,50	75,40	73,90	73,02	78,67
Kayu	27,40	21,80	25,00	23,55	17,57
Lainnya	4,10	2,80	1,10	3,43	3,75
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2010 - 2014

Konsep dinding adalah sisi luar/batas suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain. Jika bangunan tersebut menggunakan lebih dari satu jenis dinding yang luasnya sama, maka yang dianggap sebagai dinding terluas adalah dinding yang bernilai atau berkualitas lebih tinggi. Sedangkan yang dimaksud dengan dinding tembok adalah dinding yang terbuat dari susunan bata merah atau batako yang biasanya dilapisi plesteran semen.

Selama lima tahun terakhir rumah tangga yang menggunakan dinding tembok mengalami peningkatan. Pada 2014, sebanyak 78,67 persen rumah tangga di Kabupaten Temanggung menggunakan dinding tembok. Sebaliknya rumah dengan jenis dinding kayu mengalami penurunan menjadi 17.57 persen.

Tabel 4.18
 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum
 di Kabupaten Temanggung, 2010-2014

Sumber Air Minum	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ledeng	17,30	10,40	14,40	18,02	25,32
Pompa	2,60	6,20	7,80	9,25	13,88
Sumur	30,00	40,30	33,40	25,69	19,27
Mata Air	49,20	42,50	43,70	46,05	40,42
Lainnya	0,90	0,40	0,70	0,99	1,11
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2010 - 2014

Rumah tangga termasuk pengguna air bersih bila rumah tangga tersebut menggunakan air minum yang berasal dari air mineral, air ledeng/PAM, pompa air, sumur atau mata air terlindung dan lainnya.

Sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Temanggung memanfaatkan ledeng baik eceran maupun meteran yaitu sebesar 25,32 persen. Sedangkan rumah tangga dengan memanfaatkan mata air menempati urutan kedua yaitu sebesar 40,42 persen.

Fasilitas buang air besar adalah ketersediaan jamban/kakus yang dapat digunakan oleh rumah tangga. Fasilitas tempat BAB di Kabupaten Temanggung sebagian besar sudah milik sendiri dengan besaran sekitar 78,05 persen pada tahun 2014. Sedangkan mereka yang menggunakan fasilitas umum sebesar 5,67 persen, dan rumah tangga yang menggunakan fasilitas bersama sebesar 5,83 persen. Hingga tahun 2014, masih terdapat 10,46 persen rumah tangga yang tidak tersedia fasilitas buang air besar.

Tabel 4.19.
 Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan
 Fasilitas Tempat Buang Air Besar (BAB)
 di Kabupaten Temanggung, 2010-2014

Fasilitas Buang Air Besar	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sendiri	65,90	70,10	71,00	74,86	78,05
Bersama	8,40	8,70	6,00	6,08	5,83
Umum	11,20	7,00	13,30	7,70	5,67
Tidak Ada	14,50	14,20	9,70	11,35	10,46
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2010 - 2014

Fasilitas tempat pembuangan akhir tinja dari rumah tangga yang ada di Kabupaten Temanggung bervariasi jenisnya. Jenis tempat pembuangan akhir tersebut diantaranya berupa tangki, kolam/sawah, sungai, lobang tanah, tanah terbuka dan lainnya.

Tangki adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan batu bata, batu atau beton baik mempunyai bak resapan maupun tidak.

Tabel 4.20.
 Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja
 di Kabupaten Temanggung, 2010-2014

Tempat Pembuangan Akhir Tinja	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tangki	32,60	39,30	45,87	46,55	45,15
Kolam/Sawah	2,20	2,80	2,25	5,84	2,44
Sungai	29,50	30,80	28,81	24,29	23,32
Lobang Tanah	35,10	26,90	23,07	22,44	27,87
Tanah Terbuka	0,40	0,20	0,00	0,22	0,00
Lainnya	0,20	0,00	0,00	0,66	1,22
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber :Susenas 2010 - 2014

Sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Temanggung telah menggunakan Tangki sebagai tempat pembuangan akhir tinja yaitu mencapai 45,15 persen pada tahun 2014, sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 46,55 persen. Sebaliknya, persentase rumah tangga yang menggunakan tempat buang air besar lubang tanah pada 2014 meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu dari 22,44 persen menjadi 27,87 persen.

Pembuangan akhir tinja yang tidak benar merupakan salah satu masalah sanitasi dan air bersih. Perilaku tidak sehat ini, bisa menyebabkan beberapa masalah kesehatan dan risiko penyakit. Di

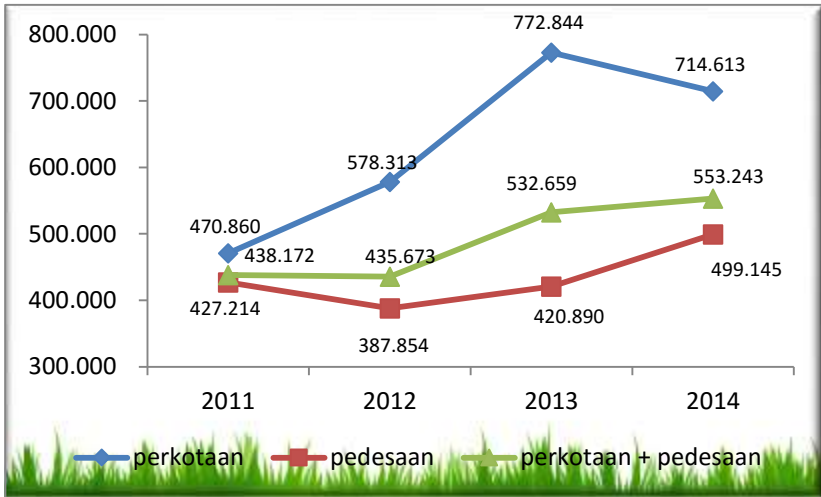
Kabupaten Temanggung terdapat 23,32 persen rumah tangga yang memiliki pembuangan akhir tinja di sungai. Hal tersebut perlu mendapat perhatian serius karena dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan teracuninya biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Selain itu, buang air besar di sungai juga dapat memicu penyebaran wabah penyakit yang dapat ditularkan melalui tinja.

4.8. Pola Pengeluaran Rumah Tangga

Ukuran kesejahteraan masyarakat di suatu daerah dapat dilihat dengan menggunakan tingkat pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. Sesungguhnya tingkat pendapatan dapat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Pendapatan yang rendah, tentunya mempersempit pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga pada kelompok masyarakat dengan penghasilan terbatas, pemenuhan konsumsi yang bersifat primer (makanan) menjadi pilihan alternatif yang utama. Sulit bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat sekunder seperti: rekreasi, membeli barang-barang penunjang hobi. Dengan keterbatasan penghasilan itu pula yang dapat mempengaruhi rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Grafik 4.9.

Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut
Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Temanggung, 2011 – 2014



Sumber : Susenas 2011 – 2014

Pada umumnya data yang menunjukkan pendapatan masyarakat sangat sulit untuk diperoleh. Sehingga pengeluaran, dalam hal ini pengeluaran rumah tangga merupakan proxy (pendekatan) dari pendapatan. Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan dari tahun 2011 – 2014. Peningkatan pengeluaran per kapita yang paling tajam terjadi dari 2013 – 2014 dimana pengeluaran per kapita per bulan pada 2013 baru mencapai Rp 471 761,00 sedangkan pada 2014 telah mencapai Rp 587 617,00. Jika dibandingkan antara daerah perkotaan dan pedesaan, terlihat bahwa pengeluaran per bulan di daerah perkotaan jauh lebih tinggi dibanding daerah pedesaan.

Pada tahun 2014, pengeluaran per kapita bulan di perkotaan sudah mencapai Rp 770.208,00, sementara di daerah pedesaan hanya sebesar Rp 527.145,00.

Tabel 4.21.
 Persentase Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Per Bulan di Kabupaten Temanggung, 2011 – 2014

Golongan pengeluaran perkapita per bulan	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
< 300000	43,91	35,10	43,74	30,68
300000 - 600000	40,44	45,14	36,11	39,14
> 600000	15,65	19,77	20,15	30,18
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2011 - 2014

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2011, sebagian besar rumah tangga, yaitu sebanyak 43,91 persen, memiliki pengeluaran per kapita per bulan dibawah Rp 300.000,00. Setahun berikutnya yaitu tahun 2012, kesejahteraan penduduk erlihat semakin meningkat, dimana rumahtangga dengan pengeluaran per kapita per bulan kurang dari Rp 300.000,00 berkurang menjadi 35,10 persen sebaliknya mayoritas rumahtangga memiliki pengeluaran antara Rp 300.000,00 – Rp 600.000,00. Perekonomian masyarakat kembali melemah pada 2013 sebagaimana terlihat bahwa mayoritas rumah tangga berada dalam golongan pengeluaran per kapita per bulan dibawah Rp 300.000,00. Pada 2014, selain perekonomian yang

meningkat, juga terlihat pengeluaran rumah tangga smakin merata. Sebanyak 39,14 persen rumah tangga memiliki pengeluaran per kapita per bulan antara Rp 300.000,00 – Rp 600.000,00, sementara rumah tangga dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah Rp. 300.000,00 dan diatas Rp 600.000,00 hampir berimbang yaitu masing-masing sebesar 30,68 persen dan 30,18 persen.

Pengeluaran rumahtangga dibedakan menjadi duayaitu: pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan (non makanan). Biasanya pengeluaran makanan dapat mencapai titik jenuh, sementara pengeluaran untuk non makanan hampir tidak terbatas. Tarik-menarik antara dua pengeluaran tersebut, dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin besar pengeluaran untuk nonmakanan, berarti tingkat kesejahteraan semakin baik. Argumentasi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan maka akan semakin kecil porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan. Menurut literatur, tingkat kesejahteraan dikatakan meningkat bila pengeluaran untuk non makanan sudah lebih dari 60 persen. Sehingga pola pengeluaran rumah tangga dapat mencerminkan besar dan kecilnya daya beli masyarakat.

Hasil Susenas menunjukkan bahwa pola pengeluaran penduduk Kabupaten Temanggung semakin membaik, sebagaimana tampak pada tabel diatas. Selama kurun waktu 2013 – 2014 persentasepengeluaran untuk makanan cenderung naik dari 47,86 persen pada tahun 2013 menjadi 49,59 persen pada tahun 2014.

Persentase untuk bukan makanan justru turun dari 52,14 persen pada tahun 2013 menjadi 50,41 persen pada tahun 2014. Berdasarkan hasil Susenas selama dua tahun tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung harus semakin ditingkatkan karena proporsi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi makanan masih cukup besar.

Tabel 4.22.
Rata – Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Temanggung, 2013 – 2014

kelompok pengeluaran	2013		2014	
	rupiah	%	rupiah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	254.942	47,86	274.378	49,59
non makanan	277.717	52,14	278.866	50,41
makanan + non makanan	532.659	100,00	553.243	100,00

Sumber : Susenas 2013 – 2014

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2014 sedikit melambat dibanding tahun – tahun sebelumnya yaitu hanya mencapai 4,92 persen.
2. Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Temanggung sepanjang 2010 – 2014 konsisten mengalami penurunan yaitu sebanyak 47,30 persen pada 2010 menjadi 46,90 persen pada 2014.
3. Angka partisipasi sekolah penduduk usia 7 – 12 tahun pada tahun 2014 masih stabil pada 99 persen sedangkan APS penduduk 13 – 15 tahun pada 2014 meningkat menjadi 91,42 persen dibanding tahun sebelumnya. Wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Temanggung juga terlihat masih belum tercapai. Persentase penduduk yang tamat SLTP baru mencapai 20,46 persen pada 2014.
4. Secara umum, persentase balita gizi baik di Kabupaten Temanggung sepanjang 2010 – 2014 cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2014, persentase balita gizi baik sebesar 88,38 persen sedangkan balita dengan gizi lebih sebesar 0,46 persen.

5. Kesadaran untuk memberikan ASI bagi anaknya di Kabupaten Temanggung semakin meningkat. Pada tahun 2014, hanya 3,09 persen balita yang sama sekali tidak pernah disusui ibunya.
6. Sebagian besar persalinan perempuan di Kabupaten Temanggung ditangani oleh tenaga kesehatan terlatih, yaitu oleh bidan sebanyak 77,91 persen pada 2014 sedangkan persalinan yang ditangani oleh dokter pada tahun 2014 mencapai 20,04 persen.
7. Sepanjang 2010 – 2014, angka harapan hidup penduduk Kabupaten Temanggung selalu mengalami peningkatan yaitu dari 75,17 tahun pada 2010 menjadi 75,34 tahun pada 2014. Angka harapan hidup Kabupaten Temanggung jauh lebih tinggi dibanding rata-rata angka harapan masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang baru mencapai 73,88 tahun pada tahun 2014.
8. Rata – rata anak yang dilahirkan hidup oleh perempuan usia 15 – 49 tahun yang berstatus pernah kawin sejak 2010 hingga 2014 sudah berada dibawah 2. Hal ini didukung oleh semakin meningkatnya rata-rata usia perkawinan pertama yang mendekati 20 tahun pada 2014.
9. Pada tahun 2014 masih terdapat 22, 85 persen wanita usia subur dan berstatus pernah kawin yang tidak sedang menggunakan KB.
10. Sebagian besar penduduk Kabupaten Temanggung merupakan keluarga sejahtera III, yaitu mencapai 45,56 persen.
11. Sepanjang lima tahun terakhir, kondisi ketenagakerjaan penduduk Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi. Tingkat partisipasi

- angkatan kerja pada 2014 mencapai 76,73 persen. Sebaliknya angka pengangguran turun menjadi 3,19 persen.
12. Masih terdapat 10,46 persen rumah tangga yang belum memiliki fasilitas Buang Air Besar dan terdapat 23,32 persen rumah tangga yang memiliki pembuangan akhir tinja di sungai.
13. Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan sepanjang 2010 – 2014. Pada tahun 2013 rata-rata pengeluaran per kapita per bulan mencapai Rp 471.761,00 sedangkan pada 2014 mencapai Rp 587.617,00.
14. Secara umum, persentase pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi makanan masih cukup tinggi yaitu mencapai 47,86 persen pada tahun 2013 dan 49,59 persen pada tahun 2014. Persentase untuk bukan makanan justru turun dari 52,14 persen pada tahun 2013 menjadi 50,41 persen pada tahun 2014.

5.2. Saran

1. Secara umum pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Meskipun paradigma pembangunan baru tidak lagi menitikberatkan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama, namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan *equity*, *pro job* dan *pro poor* akan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengurangan

kemiskinan, pengurangan pengangguran dan pemerataan hasil pembangunan.

2. Untuk meningkatkan tingkat pendidikan khususnya pendidikan dasar embilan tahun, maka selain pembebasan biaya pendidikan melalui BOS, perlu peningkatan sarana pendidikan setingkat SLTP agar biaya transportasi terjangkau untuk seluruh masyarakat. Selain itu, perlu upaya peningkatan kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama bagi masyarakat pedesaan.
3. Perlu dilakukan penelitian lebih yang lebih mendalam untuk memperoleh faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kesejahteraan rakyat Kabupaten Temanggung.